



INDUSTRI



PERDAGANGAN

**RENCANA STRATEGIS
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2016-2021**

**REVISI
AKHIR**



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
KABUPATEN KEBUMEN**



RENCANA STRATEGIS Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Tahun 2016-2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.

Dengan disusunnya RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2016-2021 ini maka kami mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan untuk jangka waktu lima tahun kedepan. RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2016-2021 merupakan komitmen dari seluruh aparatur dinas dalam rangka memberikan pelayanan yang prima dan berkualitas kepada masyarakat di bidang perindustrian, pengembangan perdagangan, dan sarana perdagangan yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen yang disusun secara sistematis dan sinergis dalam upaya mendukung Visi Bupati Terpilih Kabupaten Kebumen “Bersama Menuju Masyarakat Kebumen Yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis Dan Berkelanjutan”.

RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2016-2021 ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program yang akan dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan, peluang, kendala dan tantangan instansi pelaksana sehingga dapat dicapai sasaran dari suatu kegiatan secara efektif dan efisien.

Dokumen RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2016-2021 kami harapkan dapat berguna sebagai acuan, pedoman, dan arah dalam pengembangan serta pembangunan, dan upaya untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan di bidang perindustrian, pengembangan perdagangan, dan sarana perdagangan di Kabupaten Kebumen

Kebumen, 22 November 2017

Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
Kabupaten Kebumen

Drs. H. NUGROHO TRI WALUYO

Pembina UtamaMuda
NIP. 19620301 198503 1 013

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
Bab I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan.....	4
D. Sistematika Penulisan	5
Bab II GAMBARAN PELAYANAN OPD	
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen.....	7
B. Sumber Daya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen	12
C. Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen	14
D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Dina Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen.....	16
Bab III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen	18
B. Identifikasi Isu Isu Strtegis.....	19
C. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	20
D. Telaah Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	20
E. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	22
F. Penentuan Isu-isu Strategis.....	23
Bab IV VISI, MISI , TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
A. Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen	26
B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan	27
C. Strategi dan Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen	29
Bab V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	
A. Program dan Kegiatan	33
Bab VI INDIKATOR KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KEBUMEN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	ZZ
Bab VII PENUTUP	
A. Pedoman Transisi.....	37
B. Kaidah Pelaksanaan.....	37

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Data komposisi SDM Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2016 ...	12
2. Data Sumber Daya Sarana Dan Prasarana Dinas perindustrian dan Perdagangan	13
3. Susunan Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural Per 31 Desember 2016.....	8
4. Susunan Pegawai Berdasarkan Pendidikan Per 31 Desember 2016..	8
5. Daftar Inventaris Milik Daerah yang Dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan	9

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
1. Jumlah Pegawai Menurut Status Kepegawaiannya Per 31 Desember 2016.....	7
2. Susunan Pegawai Berdasarkan Golongan Per 31 Desember 2016.....	7
3. Susunan Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural Per 31 Desember 2016.....	8
4. Susunan Pegawai Berdasarkan Pendidikan Per 31 Desember 2016.....	9

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah maka diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang disusun secara berjangka (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD, dan rencana Kerja Pembangunan Daerah/RKPD) yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam bentuk Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) yang merupakan dokumen rencana pembangunan daerah dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan.

Secara umum Renstra OPD diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar, yaitu :

1. Sasaran apa yang hendak dicapai sesuai permasalahan dan isu strategis dalam lima tahun mendatang;
2. Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Demikian pula Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen, merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan. (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas. Kualitas penyusunan Rencana Strategis OPD akan sangat ditentukan oleh kemampuan dalam memahami permasalahan, tugas dan fungsi OPD, serta dalam menerjemahkan visi, misi, dan program pembangunan RPJMD ke dalam Rencana Strategis OPD.

Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya, dalam proses penyusunan dokumen rencana strategis OPD dilakukan dengan membangun komitmen dan kesepakatan dari semua *stakeholder* untuk mencapai tujuan rencana strategis OPD melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, partisipatif, politik, *bottom up* dan *top down*. Rencana strategis diharapkan memuat analisis yang mendalam dari masing-masing bidang tugas, tentang permasalahan yang dihadapi, potensi dan peluang yang ada, serta kebijakan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang dianggap strategis.

Selain itu Renstra Dinas Perindustrian dan perdagangan merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat dibidang perindustrian dan perdagangan yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP).

B. Landasan Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kebumen Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No: 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4764);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapn Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
24. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Provinnsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 28);

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut :

1. Menggambarkan kondisi saat ini dan masa mendatang selama 5 (lima) tahun ke depan.
2. Mengkomunikasikan Visi dan Misi Dinas perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021;
3. Mensinkronisasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan di bidang Perindustrian dan Perdagangan;
4. Memberikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pembangunan tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen dari tahun 2016-2021.

Tujuan dari Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen, adalah sebagai berikut:

1. Sebagai dokumen perencanaan teknis strategis dan sebagai alat koordinasi sinkronisasi pelaksanaan pembangunan di bidang urusan terkait Tupoksi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (stakeholders);
2. Merumuskan dan menetapkan arah dan strategi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam mencapai visi, misi, tujuan dan strategi kelembagaan serta kebijakan berdasarkan kewenangan kedinasan yang dijabarkan dari visi dan misi Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021;
3. Mengarahkan kekuatan dan peluang yang telah diidentifikasi untuk mengatasi kelemahan dan tantangan dalam suatu strategi penyelenggaraan pelayanan bidang perindustrian dan perdagangan yang berorientasi pada hasil;

4. Menyusun program strategis yang dijabarkan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) dengan kewenangan dinas sebagai dasar perencanaan program jangka menengah dan tahunan serta perencanaan kebutuhan anggaran.
5. Menyusun tolok ukur evaluasi kinerja dinas dan jajarannya secara proporsional Sebagai sarana sinkronisasi dan pelaksanaan kegiatan RPJMD Tahun 2016-2021.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021, adalah sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang;

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra OPD, fungsi Renstra OPD dalam Penyelenggaraan Pembangunan daerah, Proses penyusunan Renstra OPD, keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD, Renstra Provinsi dan dengan Renja OPD

B. Landasan Hukum;

C. Maksud dan Tujuan;

D. Sistematika Penulisan.

Bab II GAMBARAN PELAYANAN OPD

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pasar Kabupaten Kebumen;

1. Sumberdaya Alam (Lokasi OPD dan Lingkungan Kerja);
2. Sumberdaya Manusia (SDM yang dimilikindisertai table SDM sebagaimana Terlampir Tabel 2.1. Tabel SDM OPD)
3. Sarana/Prasarana (Disertai table Sarpras sebagaimana terlampir Tabel Bab 2.2. Data Kondisi dan Kebutuhan Sarpras OPD)

B. Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen;

1. Capaian Kinerja Pelayanan OPD (Tabel 2.3. Review pencapaian Kinerja Pelayanan OPD)
2. Realisasi Pendapatan Pelayanan OPD (Tabel 2.4. Anggaran dan RealisasiPendapatan Pelayanan OPD)
3. Capaian Sasaran Rentra OPD Kabupaten Kota/Kota terhadap Sasaran Rentra OPD Provinsi dan Rentra K/L (Tabel 2.5. Komparasi Capaian Sasaran Renstra OPD Kabupaten terhadap Sasaran Renstra OPD Provinsi dan Renstar K/L)
4. Analisis terhadap Dokumen RT/RW (Tabel 2.6. Hasil Telaahan Pola Ruang WiayahProvinsi/Kabupaten/Kota)
5. Analisis terhadap Dokumen KLHS (Tabel 2.7. Hasil Analisis terhadap Okumen KLHS).

Bab III ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen (disertai Tabel 3.1.);
- B. Identifikasi Isu-Isu Strategis (Tabel 3.2).
- C. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih (Tabel 3.3. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah) ;
- D. Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV VISI, MISI , TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- A. Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen;
- B. Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen;
- C. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen (Tabel 4.1.);
- D. Perumusan Strategi dan Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen (Tabel 5.1.).

Bab V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab VI INDIKATOR KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KEBUMEN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab VII PENUTUP

- A. Pedoman Transisi
- B. Kaidah Pelaksanaan

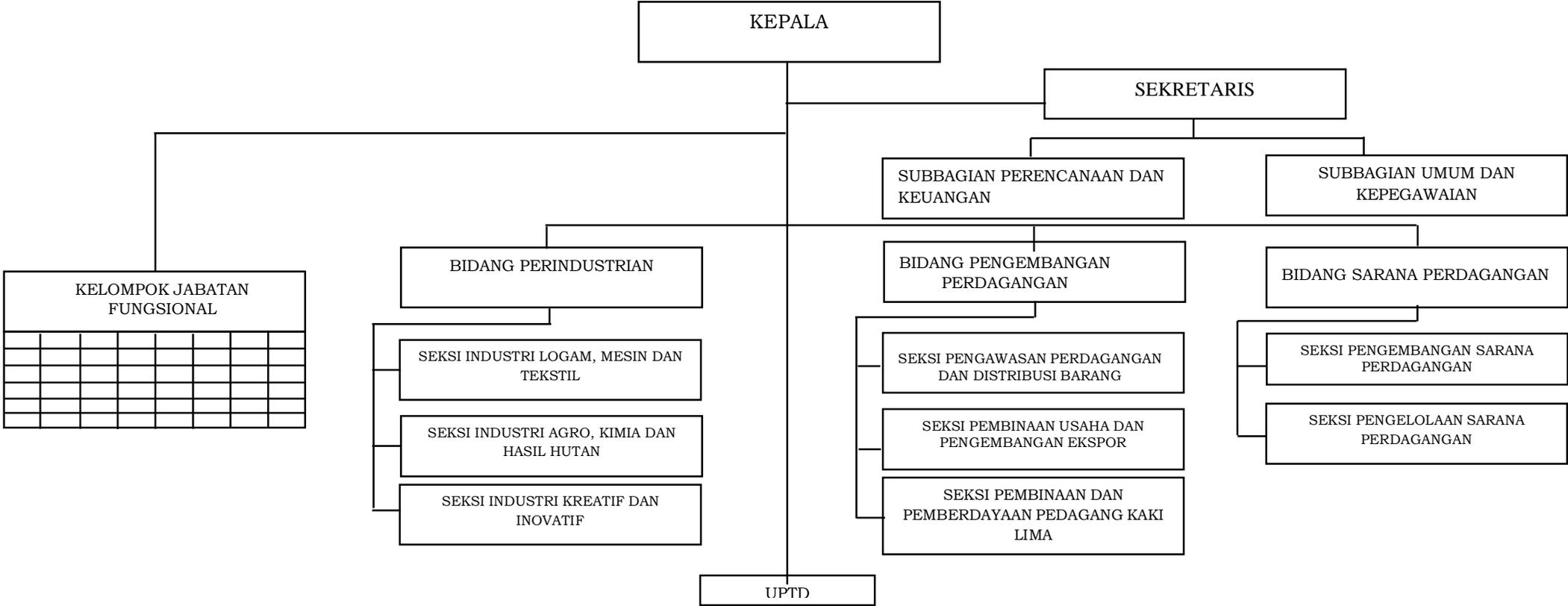
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KEBUMEN

A. Struktur Organisasi dan Tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen, Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen tergambar pada bagan Sebagaimana tertuang pada gambar 2.1. Adapun Tugas pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen sebagaimana tertuang pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tersebut diatas yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen merupakan perangkat daerah di bidang perindustrian dan perdagangan. Guna melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana dan program di bidang perindustrian, pengembangan perdagangan, dan sarana perdagangan;
- b. perumusan kebijakan di bidang perindustrian, pengembangan perdagangan, dan sarana perdagangan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian, pengembangan perdagangan, dan sarana perdagangan;
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian, pengembangan perdagangan, dan sarana perdagangan;
- e. pelaksanaan administrasi Dinas;
- f. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAGAN ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



Berdasarkan bagan pada gambar 2.1 diatas, maka dapat dijelaskan tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen sampai pada tingkat Sekretariat dan Bidang-bidang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen atau tingkat seksi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen serta Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen dengan tugas pokok dan fungsi selengkapnya adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat Dinas mempunyai fungsi:

1. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
2. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
3. pembinaandan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
4. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
5. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas;
6. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
7. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas;
8. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
9. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

c. Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi bidang perindustrian. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan pembinaan

dan pengawasan perizinan serta pedoman pembinaan kegiatan usaha di bidang industri;

2. pemberian bimbingan teknis, pembinaan, pengembangan sarana usaha dan produksi di bidang industri;
3. pemberian bimbingan teknis peningkatan mutu hasil produksi, penerapan standarisasi, pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi;
4. pelaksanaan analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang industri;
5. penyiapan bimbingan teknis serta pemantauan penanggulangan dan pencegahan pencemaran industri;
6. fasilitasi pemberian penghargaan bagi pelaku usaha industri berprestasi; dan
7. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bidang Industri dibantu oleh 3 seksi yaitu:

a) Seksi Industri Logam, Mesin dan Tekstil

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan, pengembangan sarana usaha produksi, penerapan standar pengawasan mutu, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di industri logam, mesin dan tekstil.

b) Seksi Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan, pengembangan sarana usaha produksi, penerapan standar pengawasan mutu, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di industri agro, kimia dan hasil hutan.

c) Seksi Industri Kreatif dan Inovatif

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan industri elektronika dan telematika, kerajinan, alat transportasi periklanan, arsitektur, pasar barang seni, desain, fesyen, video dan film, fotografi, permainan inovatif, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan piranti lunak, televisi dan radio, riset dan pengembangan, kuliner, dan industri lainnya (aneka).

d. Bidang Pengembangan Perdagangan

Bidang Pengembangan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengawasan perdagangan dan distribusi barang, metrologi, pembinaan usaha perdagangan dan pengembangan ekspor, pembinaan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Pengembangan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

1. pengawasan perdagangan dan distribusi barang;
2. metrologi;
3. pembinaan usaha perdagangan dan pengembangan ekspor;
4. pembinaan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; dan
5. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bidang Pengembangan Perdagangan dibantu oleh 3 seksi yaitu:

a) Seksi Pengawasan Perdagangan dan Distribusi Barang.

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengawasan terhadap perizinan di bidang perdagangan, perdagangan barang yang diawasi, dilarang dan/atau diatur, distribusi barang dan/atau jasa, penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting, ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting, penyaluran, penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida serta metrologi.

b). Seksi Pembinaan Usaha dan Pengembangan Ekspor.

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perluasan akses pasar dan memperkenalkan barang dan/atau jasa di dalam negeri dan/atau di luar negeri, pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor untuk perluasan akses pasar bagi barang dan jasa produksi dalam negeri, promosi dagang berupa pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan daerah untuk memperluas peluang peningkatan ekspor, pengembangan dan penguatan usaha di bidang perdagangan, pemberian fasilitas pengembangan sarana perdagangan lainnya, pembinaan dan fasilitasi Sistem Resi Gudang (SRG), pembinaan di bidang pemasaran, pengembangan kemitraan usaha, dan pembinaan tentang legalitas usaha.

c). Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan

perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pendataan, perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan sektor informal, pembinaan dan bimbingan teknis, dan pengembangan kemitranan dengan dunia usaha.

e. Bidang Sarana Perdagangan

Bidang Sarana Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembangunan dan pengelolaan sarana perdagangan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Sarana Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

1. pembangunan, penataan dan ketertiban pasar;
2. pemberian bimbingan di bidang sarana prasarana pasar;
3. pemantauan, pengawasan, penataan dan pengaturan sarana prasarana serta pemeliharaan, pengaturan air dan penerangan pasar;
4. pengaturan keamanan, ketertiban pasar dan lingkungannya;
5. pengelolaan pendapatan dan kebersihan pasar;
6. pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang kebersihan;
7. pendataan, perencanaan, penerimaan, penagihan, penyetoran dan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan retribusi dan pendapatan lain-lain;
8. inventarisasi dan penyiapan bahan pembinaan serta pengawasan, evaluasi dan pelaporan serta penanganan perizinan; dan
9. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bidang Sarana Perdagangan dibantu oleh 2 seksi yaitu:

a) Seksi Pengembangan Sarana Perdagangan.

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengawasan terhadap pembangunan, penataan dan ketertiban pasar, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang sarana prasarana pasar, pemantauan, pengawasan, penataan dan pengaturan sarana prasarana serta pemeliharaan, pengaturan air dan penerangan pasar, pengaturan keamanan pasar serta ketertiban pasar dan lingkungannya.

b). Seksi Pengelolaan Sarana Perdagangan.

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan pendapatan dan kebersihan pasar, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang kebersihan, pengaturan

kebersihan, pendataan, perencanaan, penerimaan, penagihan, penyetoran dan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan retribusi dan pendapatan lain-lain, inventarisasi dan penyiapan bahan pembinaan serta pengawasan, evaluasi dan pelaporan serta penanganan perizinan.

f. Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan wilayah kerjanya. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pasar sesuai dengan kebijakan yang telah di tetapkan;
- 2) Pelaksanaan pendapatan, penetapan, perencanaan, penerimaan, penagihan, intensifikasi, ekstensifikasi pemungutan dan penerimaan retribusi pasar daerah, serta pendapatan lain-lain sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- 3) Pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap urusan retribusi pasar, pengaturan ruko kios dan loos pasar;
- 4) Pengurusan dan pelaksanaan pembinaan dipanen pengaasan perizinan hunian kios-kios, pengaturan sarana dan prasarana penghasil retribusi pasar;
- 5) Pembukuan, penyusunan laporan realisasi penerimaan retribusi pasar daerah dan pendapatan lain-lain;
- 6) Mengkoordinir kepala-kepala unit di masng-masing wilayah pasar sesuai wilayah kerjanya;
- 7) Pelaksanaan perencanaan, urusan tata usaha, surat menyurat, kearsipan, keuangan, kepegawaian dan tata laksana serta rumah tangga dan perlengkapan; dan
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

h. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

B. Sumber Daya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen

1. Sumber daya Alam

Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdiri di atas tanah yang sangat setrategis yaitu 100 meter sebelah utara dari pusat kota, dan satu komplek dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Kesehatan kabupaten Kebumen yaitu berada di Jalan HM Sarbini Nomor 17 Kelurahan Bumirejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.

2. Sumberdaya Manusia

Secara Kuantitas, pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen berjumlah 303 orang yang terdiri dari 129 orang Pegawai Negeri Sipil dan 174 orang non Pegawai Negeri Sipil.

Secara kualitas, pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen sebagian besar berpendidikan S2 3 orang (1,36%), S1 yaitu 29 orang (16,31%) sedangkan yang lainnya berpendidikan SMA yaitu 177 orang (52,49%), Sarjana Muda 14 Orang (4,07%), SMP 50 orang (21,27%), dan ada juga yang berpendidikan Sekolah Dasar 32 Orang (9,30%). Sedangkan untuk non pegawai negeri sipil direkrut dengan kedudukan sebagai tenaga harian lepas yang ditempatkan sesuai kemampuannya. Sebagian besar tenaga harian lepas berpendidikan SMA.

Pegawai yang menduduki jabatan eselon sebagian besar sudah mengikuti diklat struktural sesuai kapasitasnya. Tetapi ada juga yang belum mengikuti yaitu sebanyak 2 orang (10,53%)

Secara lengkap kondisi Sumberdaya manusia yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen disajikan pada tabel 2.2

Tabel 2.2.
DAFTAR KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TAHUN 2017

ESELON	BERDASARKAN GOLONGAN						BERDASARKAN PENDIDIKAN							DIKLAT YANG DIKUTI		
	IV	III	II	I	NON PNS	JML	S2	S1	D3/ SARMUD	SMA	SMP	SD	JML	STRUK	FUNG	JML
ESELON II	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0
ESELON III	4	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	4	4	0	0
ESELON IV	0	14	0	0	0	14	1	9	1	3	0	0	14	12	1	3
JAB FUNG	1	2	0	0	0	3	0	1	0	2	0	0	3	0	3	0
STAF	0	20	79	8	0	107	0	11	4	60	20	12	107	3	3	2
THL	0	0	0	0	144	144	0	3	4	100	24	13	144	0	0	0
PTT	0	0	0	0	25	25	0	0	0	12	6	7	25	0	0	0
TPL	0	0	0	0	5	5	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0
JUMLAH	6	36	79	8	174	303	3	29	14	177	50	32	303	3	2	5
% DARI JML Peg	2,71	15,38	35,73	3,62	41,62	100	1,36	16,31	4,07	52,49	21,27	9,50	100,00	60	40	100

Berdasarkan tabel tersebut, secara kuantitas pegawai Dinas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen belum mencukupi untuk melaksanakan kinerja secara lebih baik. Apabila setiap seksi ada 4 personil dan masing masing pasar daerah ada 10 personil maka total kebutuhan pegawai negeri sipil mestinya berjumlah 303 orang. Berarti Dinas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen masih kekurangan pegawai sejumlah 174 orang.

Guna mengatasi hal tersebut, maka Dinas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen melakukan perekrutan tenaga harian lepas dimana pada tahun 2016 kondisinya berjumlah 149

orang. Kelemahan dari tenaga harian lepas adalah seringnya berganti personil.

3. Sarana dan Prasarana

Untuk kelancaran tugas dalam menjalankan fungsi pelayanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan didukung oleh sarana dan prasarana kantor untuk operasional organisasi yang meliputi ruang, perlengkapan kerja, peralatan kerja, sarana telekomunikasi, dan transportasi. Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang tersedia sudah cukup memadai, namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Adapun daftar inventaris sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.

DATA SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN JENIS SARPRAS	KONDISI				KEBUTUHAN JANGKA 5 TAHUN	PERLU PENAMBAHAN	PERLU PEMELIHARAAN
	BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	JUMLAH			
TANAH	56	0	0	56			
BANGUNAN GEDUNG KANTOR	6	0	0	6	4	4	6
BANGUNAN PASAR	35	0	0	35	5	5	35
POMPA AIR	1	0	0	1			
KEND R.6 /TRUK AMROL	1	0	0	1		2	1
KEND R.4 / MOBIL	4	0	0	4	6	6	6
KEND R.2 / MOTOR	25	10	1	36	5	5	36
KEND R.3 / MOTOR TOSSA	11	0	0	11			11
TIMBANGAN	4	0	0	4			4
BEJANA UKUR	1	0	0	1			1
MESIN KETIK MANUAL	22	6	6	34	6	6	6
CALCULATOR	17	0	2	19	10	10	10
MESIN STENSIL LISTRIK	0	0	1	1			
LEMARI BESI	5	0	5	10	5	5	5
RAK BESI / METAL	6	0	6	12	6	6	
RAK KAYU	3	1	2	6	2	2	1
LEMARI KAYU	24	2	3	29	3	3	2
FILLING CABINET	23	13	7	43	7	7	13
BRANKAS	5	0	0	5			
LEMARI SOROK	3	0	0	3			
LEMARI PINTU KACA	0	0	3	3	3	3	
PAPAN INSTANSI	1	0	0	1	1	1	
WHITE BOARD	3	0	5	8	5	5	
KURSI BESI METAL	22	0	15	37	15	15	
KURSI KAYU	88	14	0	102			15
KURSI KAYU ROTAN	11	6	38	55			
ZISE	9	1	0	10			
MEJA RAPAT	4	0	5	9	5	5	

PODIUM	1	0	0	1	1	1	
MEJA KETIK	0	0	2	2	2	2	
MEJA PANJANG	6	5	4	15	4	4	
KURSI TAMU	1	3	0	4			
KURSI PUTAR	10	6	5	21	5	5	5
BANGKU TUNGGU	11	4	0	15			
KURSI LIPAT	32	36	20	88			36
MEJA KOMPUTER	4	3	1	8			3
MEJA 1/2 BIRO	103	52	6	161	6	6	52
SOFA	1	0	0	1			
MEJ KECIL	23	0	0	23			
JAM ELEKTRONIK	0	0	3	3			
JAM DINDING	1	0	0	1			
A C	4	0	0	4		6	
KIPAS ANGIN	12	1	0	13			
AMPLIFIER / TOA	1	0	0	1		1	
RADIO WIRLES	2	-	-	2			
MEGA PHONE / TOA	4	-	-	4	4	4	
STABILIZER	3	-	-	3			
HANDYCAM VIDEO KAMERA	1	-	-	1	1	1	
LAMBANG GARUDA	1	-	-	1			
TABUNG PEMADAM	17	-	-	17	18	18	
LCD PROYEKTOR	1	-	-	1	1	1	
KOMPUTER	11	-	3	14	3	3	
LAP TOP	6	-	-	6	3	3	
PRINTER	10	-	2	12	3	3	
KELENGKAPAN KOMP	1	-	-	1			
MEJA BIRO	2	11	6	19	6	6	11
MEJA PEJ ESS III	1	-	-	1			1
MEJA ESS IV	1	-	-	1			
KURSI ESS II	1	-	-	1			
KURSI ESS III	1	-	-	1			
KURSI ESS IV	4	-	-	4			
CAMERA DIGITAL	1	1	-	2	1	1	
PESAWAT TELP	2	-	-	2			

Berdasarkan tabel terlihat bahwa beberapa sarana prasarana penting dalam pelayanan administrasi perkantoran dan kinerja lainnya perlu penambahan dan pemeliharaan. Kekurangan tersebut diupayakan penambahannya melalui kegiatan pembangunan secara bertahap setiap tahunnya selama kurun waktu 5 tahun.

C. Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen

1. Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tertuang pada bab sebelumnya, gambaran pelayanan yang telah dilakukan dapat dicerminkan berdasarkan

indikator kinerja sebagaimana tertuang pada renstra periode 2010-2015.

Secara total, pencapaian indikator kinerja berdasarkan tugas dan fungsi mencapai 95,24 %. dari seluruh indikator tersebut ada 40 indikator yang capainya 90 % ke atas sedangkan yang capainya di bawah 90 % ada 2 indikator. Indikator yang capainya di bawah 90 % disebabkan oleh Kinerja pada sektor industri dan perdagangan di Kabupaten Kebumen telah mampu mendorong struktur ekonomi daerah yang tangguh.

a. Sektor Industri

Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional ke depan serta mengurangi pengangguran dan sekaligus untuk mampu bersaing dalam pasar global, maka pengembangan industri di Kabupaten Kebumen perlu mempertimbangkan aspek potensial yang ada, yaitu: penerapan teknologi, ketersediaan bahan baku (jumlah dan kualitas), informasi pasar, serta berkembangnya Kelompok Usaha Bersama (KUB), meluasnya akses terhadap sumber permodalan yang memiliki kapasitas dukungan lebih besar seperti perbankan, mengurangi ketergantungan terhadap produk impor, fasilitasi terhadap pengurusan izin usaha.

Banyak program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen guna mengembangkan Industri Kecil dan Menengah. Diantaranya adalah Program pengembangan industri kecil dan menengah, Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi. Tujuan dari program-program tersebut adalah untuk memberdayakan dan mengembangkan industri kecil dan menengah di Kabupaten Kebumen, agar mampu berperan dalam memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi, terutama perluasan kesempatan kerja untuk pengentasan kemiskinan.

Sasaran program tersebut adalah tumbuhnya wirausaha baru, meningkatnya daya saing produk, meningkatnya jumlah produk yang dihasilkan, serta penguasaan teknologi modern. Program tersebut dijabarkan melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dengan cara :

- a. Bantuan peralatan/mesin produksi;
- b. Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk melalui pelatihan;
- c. Pengembangan IKM melalui pemanfaatan bahan baku berbasis sumber daya alam;
- d. Pengembangan ragam produk-produk unggulan IKM;
- e. Fasilitasi ijin PIRT bagi IKM;
- f. Fasilitasi legalitas merek bagi IKM.

b. Sektor Perdagangan

Sektor perdagangan semakin penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Globalisasi yang sedang kita hadapi yang ditandai dengan membanjirnya produk asing/impor di Indonesia mengakibatkan persaingan dagang barang dan jasa yang semakin bebas dan ketat. Untuk itu perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana perdagangan melalui langkah-langkah yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen, yaitu :

- a. Peningkatan kelancaran distribusi barang dan jasa hasil produk dan kebutuhan masyarakat;
- b. Meningkatkan upaya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan;
- c. meningkatkan perdagangan produk unggulan Kabupaten Kebumen dengan memperluas jaringan bisnis dan promosi produk unggulan, dengan cara mengikuti pameran tingkat nasional dan daerah;
- d. Pengawasan barang dan jasa yang beredar;
- e. Penyediaan informasi mengenai harga kepokmas;
- f. Pembinaan terhadap pedagang kaki lima dan asongan;
- g. Melaksanakan gerakan konsumen cerdas dan cinta produk Indonesia.
- h. Rehabilitasi/perbaiki sarana dan prasarana pasar, serta meningkatkan kebersihan dan keamanan pasar.

Secara detail dan lengkap, data capaian indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3. Review Pencapaian Kinerja pelayanan Perangkat Daerah

No	indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target RenstraSKPD Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
2	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
3	Tercapainya pemeliharaan dan BBM kendaraan dinas				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
4	Tercapainya penatausahaan keuangan				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
5	Tercapainya kebersihan kantor				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
6	Terperuhnya perbaikan peralatan kantor				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
7	Terperuhnya kebutuhan alat tulis kantor				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
8	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
9	Terperuhnya penerangan kantor				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
10	Terperuhnya bahan bacaan				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
11	Terperuhnya kebutuhan makanan dan minuman untuk rapat tamu				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
12	Terselenggaranya perjalanan luar daerah ke pusat dan provinsi				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
13	Tercapainya pemenuhan honor PTT				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
14	Terselenggaranya perjalanan dinas dalam daerah				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
15	Terperuhnya kendaraan dinas operasional				0	0	3	0	2	0	0	3	0	3	0	0	100	0	150
16	Terperuhnya lokasi tanah untuk pembangunan pasar				0	0	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	200	0
17	Terperuhanya gedung kantor				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
18	Terperuhnya perlengkapan kantor				0	5	5	5	5	0	5	5	5	5	0	100	100	100	100
19	Terperuhnya peralatan gedung kantor				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100	100	100	100

20	Terpenuhinya meubel kantor				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Tersusunnya dokumen renja, renstra, LAKIP, LKPJ, LPPD, dan laporan progres target dan realisasi bulanan				1	1	3	3	3	1	1	3	3	3	100	100	100	100	100
22	Tersusunnya data profil pasar, industri kecil menengah dan perdagangan				0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	100	0	100
23	Terpenuhinya pelayanan pengaduan dan sengketa konsumen				60	120	120	120	120	60	120	120	120	120	100	100	100	100	100
24	Terlaksananya pengawasan terhadap barang dan jasa beredar di pasaran				26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	100	100	100	100	100
25	Terlaksananya tera ulang alat UTTP				0	26	26	26	26	0	26	26	26	26	0	100	100	100	100
26	Terlaksananya pengawasan peredaran pita cukai illegal				0	0	0	26	26	0	0	0	26	26	0	0	0	100	100
27	Terlaksananya bantuan peralatan dan mesin untuk IKM di Kabupaten Kebumen				9	11	6	9	10	9	11	15	9	0	100	100	250	100	0
28	Tercapainya jaringan klaster industri melalui pembinaan dan bantuan peralatan/mesin industri				26	13	23	10	18	26	13	25	16	5	100	100	108,7	160	27,78
29	Tercapainya pemberian ijin PIRT bagi IKM				0	0	0	15	25	0	0	0	30	50	0	0	0	200	200
30	Terlaksananya bantuan peralatan atau mesin dan pelatihan bagi IKM untuk KUB dan termonitornya bantuan alat yang telah diberikan ke KUB tahun sebelumnya				0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0
31	Tersedianya peraturan daerah retribusi pasar dan peraturan daerah pasar grosir				2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	100	0	0	0	0
32	Tercapainya target pendapatan keuangan daerah				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100	100	100	100	100
33	Tersedianya sarana pusat penampungan produksi hasil pertanian/perkebunnen masyarakat yang akan dipasarkan				0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	100	0	0	0	0
34	Tersedianya sarana dan prasarana tempat usaha PKL dan asongan				20	0	0	0	0	11	0	0	0	0	55	0	0	0	0
35	Terpenuhinya data informasi harga kebutuhan bahan pokok				0	35	35	35	35	0	35	35	35	35	0	100	100	100	100

36	Pengembangan usaha perdagangan melalui kegiatan-kegiatan pameran, promosi dan informasi perdagangan				0	3	1	1	2	0	3	3	4	4	0	100	300	400	200
37	Peningkatan retribusi pelayanan pasar, retribusi kebersihan pasar, retribusi parker				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100	100	175	100	100
38	Terpenuhinya kebersihan dan keamanan pasar				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Pengembangan pengelolaan gudang dengan sistem resi gudang terlaksana dengan meningkatnya kemanfaatan gudang bagi usaha pertanian				0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
40	Terbinannya organisasi PKL				0	0	0	1	200	0	0	200	1	4	0	0	0	100	2
41	Terfasilitasnya sertifikat hak cipta				0	8	0	5	4	0	8	0	5	4	0	100	0	100	100
42	Terpenuhinya prasarana dan sarana pengelolaan persampahan				0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0

2. Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Setiap tahun Dinas Perindustrian dan Perdagangan mendapatkan alokasi anggaran untuk pelaksanaan indikator kinerja yang meningkat setiap tahunnya. Adapun secara total rata-rata penyerapan anggaran setiap tahun berkisar diatas 95 % dengan capaian fisik 100%. Hal ini berarti penyerapan anggaran sudah cukup baik bahkan ada efisiensi anggaran karena fisik telah tercapai 100%. Secara lengkap, data capaian realisasi pendanaan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Perangkat Daerah

Indikator Kinerja (Indikator sasaran/Indikator Kinerja Utama)	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata rata	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun	3.74	1.56	3.74	3.74	5.00	3.74	1.56	3.74	3.74	5.00	99.97	99.93	99.96	99.95	99.95	13.80	13.79
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	84.94	77.49	359.07	359.72	380.00	83.34	74.29	219.53	354.27	361.24	98.11	95.88	61.14	98.48	95.06	957.22	803.67
Tercapainya pemeliharaan dan BBM kendaraan dinas	64.92	44.35	85.63	70.00	85.00	6.55	44.31	82.11	68.44	76.08	10.09	99.91	95.89	97.77	89.51	281.89	216.63
Tercapainya penatausahaan keuangan	72.00	46.00	77.21	82.85	84.39	71.80	45.19	75.93	82.85	83.89	99.72	98.24	98.35	100.00	99.41	294.94	292.55
Tercapainya kebersihan kantor	2.62	2.34	5.12	5.12	6.00	2.62	2.34	5.11	5.11	5.98	99.99	99.83	99.79	99.65	99.73	16.42	16.38
Terpenuhinya perbaikan peralatan kantor	12.80	12.86	12.80	12.80	13.50	12.80	12.85	12.80	12.76	13.44	99.98	99.92	99.99	99.68	99.56	53.96	53.89
Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	26.91	17.57	23.91	23.91	30.00	26.90	17.57	23.90	23.89	30.00	99.98	99.99	99.97	99.95	100.00	98.29	98.26
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	120.31	101.44	144.00	317.75	292.56	119.95	100.89	143.98	317.59	277.34	99.70	99.46	99.99	99.95	94.80	742.01	737.88
Terpenuhinya penerangan kantor	3.84	1.95	7.84	7.84	12.80	3.84	1.95	7.84	7.84	12.79	99.88	99.78	99.99	99.98	99.94	24.03	24.02
Terpenuhinya bahan bacaan	1.12	0.78	1.12	1.12	1.50	0.84	0.76	0.93	1.12	1.45	74.87	97.57	82.53	100.00	96.54	4.45	3.94
Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman untuk rapat tamu	11.80	7.84	10.00	16.00	14.00	11.28	7.80	9.99	15.98	13.93	95.58	99.52	99.95	99.89	99.49	48.44	47.84
Terselenggaranya perjalanan luar daerah ke pusat dan provinsi	48.00	47.86	76.00	80.00	108.40	47.93	47.86	76.00	79.98	108.31	99.86	100.00	99.99	99.97	99.92	273.54	273.42
Tercapainya pemenuhan honor PTT	413.53	387.28	424.80	451.44	315.90	400.95	387.28	415.20	450.12	315.90	96.96	100.00	97.74	99.71	100.00	1,740.23	1,716.73
Terselenggaranya perjalanan dinas dalam daerah	11.20	9.77	10.00	13.56	20.00	11.17	9.77	10.00	13.51	20.00	99.71	99.98	99.97	99.66	100.00	48.52	48.44
Terpenuhinya kendaraan dinas operasional	0.00	15.63	50.00	0.00	411.24	0.00	14.96	49.80	0.00	400.72		95.75	99.60	#DIV/0!	97.44	147.87	144.91

Terpenuhinya lokasi tanah untuk pembangunan pasar	0.00	0.00	0.00	3,550.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	3,517.58	1,573.48	#DIV/0!	#DIV/0!		99.09	16.56	5,450.00	3,832.28
Terpeliharanya gedung kantor	13.04	7.81	0.00	12.00	22.65	11.92	7.77	0.00	11.85	22.37	91.40	99.44		98.77	98.78	37.38	36.01
Terpenuhinya sarana dan prasarana gedung kantor			151.31	191.01	203.10			110.88	187.01	188.18	#DIV/0!	#DIV/0!	73.28	97.90	92.66	382.94	335.52
Terpenuhinya meubel kantor	0.00	0.00	0.00	7.50		0.00	0.00	0.00		7.50				0.00		7.50	1.50
Terpeliharanya peralatan kebersihan pasar	112.64	15.63	34.00	30.00	35.00	100.27	15.62	33.94	29.99	34.87	89.02	99.96	99.83	99.98	99.64	199.27	186.80
Tersusunnya dokumen renja, renstra, LAKIP, LKPJ, LPPD, dan laporan progres target dan realisasi bulanan	362.00	50.00	25.00	25.00	80.00	256.66	49.26	24.53	21.85	79.03	70.90	98.53	98.11	87.40	98.79	478.00	368.11
Tersusunnya data profil pasar, industri kecil menengah dan perdagangan	30.00		40.00			30.00		39.64			99.99	#DIV/0!	99.10			70.00	69.64
Terpenuhinya pelayanan pengaduan dan sengketa konsumen	30.00	50.00	50.00	40.00	40.00	29.97	50.00	49.94	40.00	39.97	99.92	100.00	99.88	100.00	99.92	178.00	177.91
Terlaksananya pengawasan terhadap barang dan jasa beredar di pasaran	25.84	35.00	60.00	10.00	20.00	25.84	35.00	44.33	10.00	19.97	100.00	99.99	73.88	100.00	99.85	134.84	119.15
Terlaksananya tera ulang alat UTTP		5.00	5.00	5.00	6.00		5.00	5.00	5.00	5.97		99.99	99.99	100.00	99.58	16.20	16.19
Terlaksananya pengawasan peredaran pita cukai ilegal		0.00	0.00	20.00	30.00		0.00	0.00	20.00	29.97				99.99	99.90	26.00	25.99
Terlaksananya bantuan peralatan dan pelatihan untuk IKM di Kabupaten Kebumen	75.00	114.00	160.00	156.00	146.44	73.99	108.59	158.09	155.21	145.10	98.66	95.26	98.81	99.49	99.09	534.29	524.91
Tercapainya jaringan klaster industri melalui pembinaan dan bantuan peralatan/mesin industri	386.69	365.00	430.00	450.00	600.00	378.52	363.81	426.81	449.02	597.50	97.89	99.67	99.26	99.78	99.58	1,751.69	1,737.66
Tercapainya pemberian ijin PIRT bagi IKM		0.00	0.00	5.50	20.00		0.00	0.00	5.43	20.00				98.73	100.00	9.50	9.43
Terlaksananya bantuan peralatan atau mesin dan pelatihan bagi IKM untuk KUB dan termonitornya bantuan alat yang telah diberikan ke KUB tahun sebelumnya		0.00	0.00		10.00		0.00	0.00		10.00					99.98	2.00	2.00
Tersedianya perda retribusi pasar dan perd pasar grosir		0.00	0.00				0.00	0.00								0.00	0.00

Tercapainya target pendapatan keuangan daerah	114.00		110.50		100.00	112.99		107.15		98.86	99.12		96.97		98.86	244.50	239.92
Tersedianya sarana pusat penampungan produksi hasil pertanian/perkebunnen masyarakat yang akan dipasarkan	0.00	3,909.17	0.00	0.00	0.00	0.00	3,899.99	0.00	0.00			99.77				3,909.17	3,899.99
Tersedianya sarana dan prasarana tempat usaha PKL dan asongan		80.00	721.50		45.00		79.68	674.10		44.69		99.60	93.43		99.31	810.50	762.72
Terpenuhinya data informasi harga kebutuhan bahan pokok		10.00	10.00					9.98				0.00	99.85			20.00	9.98
Pengembangan usaha perdagangan melalui kegiatan-kegiatan pameran, promosi dan informasi perdagangan		50.00	80.00		145.00		48.40	77.99		143.89		96.80	97.48		99.23	159.00	155.16
Peningkatan retribusi pelayanan pasar, retribusi kebersihan pasar, retribusi parkir	2,353.16	59,926.21	17,317.64		24,002.60	2,252.79	59,329.62	17,118.17		16,953.45	95.73	99.00	98.85		70.63	84,397.53	82,091.26
Terpenuhinya kebersihan dan keamanan pasar					215.00					213.04					99.09	43.00	42.61

3. Capaian Sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen Terhadap Sasaran Renstra OPD Provinsi dan Renstra K/L.

Berdasarkan SPM/IKK, ada beberapa indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen yang mendukung atau sinergis dengan indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Perdagangan. Adapun perbandingan capaian indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Kebumen terhadap capaian indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Perdagangan

4. Analisis terhadap Dokumen RT/Rw.

Beberapa indikasi program/kegiatan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen dipengaruhi oleh rencana pola ruang sebagaimana yang tertuang pada dokumen RT/RW kabupaten Kebumen. Beberapa indikasi program tersebut yaitu:

1. Program Penataan Struktur Industri.
 - a. Kegiatan penyediaan sarana maupun prasarana kluster industri;
 - b. Penyusunan Rencana Induk Industri Daerah.
2. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
 - a. Fasilitasi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya;
 - b. Pembinaan kemampuan ketrampilan kerja bagi industri kecil menengah di lingkungan IHT dan/atau daerah penghasil bahan baku industri;
 - c. Pembinaan IKM dalam memperkuat jaringan kluster industri;
 - d. Pemberian kemudahan izin usaha IKM

Berdasarkan hal tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan program-program tersebut menyesuaikan arahan lokasi pengembangan pada dokumen RT/RW Hasil telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen.

5. Analisis Terhadap Dokumen KLHS.

Dalam penyusunan dokumen rencana strategis sangat penting melihat aspek penataan ruang daerah secara komprehensif. Penyusunan perencanaan perlu adanya upaya sinkronisasi terhadap pembinaan dan pengendalian pengembangan wilayah secara terus dilakukan. Salah satu perwujudan hal tersebut adalah dengan memformulasikan tujuan penataan ruang daerah sebagai acuan dalam setiap aspek perencanaan yaitu mewujudkan perkembangan wilayah Kabupaten yang mandiri secara ekonomi dan merata pelayanannya melalui pengembangan agrobisnis yang berkelanjutan yang aman, nyaman, dan produktif.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen

Tahun 2011-2031, Ruang lingkup Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen mencakup :

- a. Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten;
- b. Rencana Struktur Ruang wilayah Kabupaten;
- c. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten;
- d. Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten;
- e. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten, dan Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten;
- f. Hak, kewajiban dan peran serta masyarakat;
- g. Kelembagaan; dan
- h. Penyelesaian sengketa.

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen terdapat Kawasan Peruntukan Industri, yang terdiri atas kawasan peruntukan industri besar, kawasan peruntukan industri menengah, kawasan peruntukan industri kecil dan mikro. Rancangan peruntukan industri, meliputi :

- a. Pengelolaan disesuaikan dengan manajemen kawasan peruntukan industri dan memperhatikan dampak lingkungan;
- b. Pelibatan penduduk sekitar dalam proses produksi untuk menghindari kesenjangan interwilayah;
- c. Pengembangan di luar kawasan peruntukan industri berdasarkan atas pertimbangan lokasi tersedianya bahan mentah;
- d. Pembinaan industri kecil dan mikro dilakukan guna meningkatkan nilai produk hasil-hasil pertanian;
- e. Pengembangan kawasan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ekologis, memperhatikan daya dukung lahan dan tidak mengkonversi lahan pertanian secara besar-besaran;
- f. Pengembangan kawasan harus didukung oleh adanya jalur hijau sebagai penyangga antar fungsi kawasan;
- g. Pengembangan kawasan harus didukung oleh sarana dan prasarana industri; dan
- h. Pengembangan kegiatan industri berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan.

Terkait Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penataan ruang Kabupaten Kebumen, analisis mengenai daya dukung fisik dan lingkungan merupakan sesuatu yang penting, karena hasil dari analisis ini dapat membantu dalam menentukan arah kesesuaian peruntukan lahan sehingga tidak menimbulkan berbagai persoalan. Kajian Lingkungan Hidup Strategis sangat penting untuk menjadi acuan dalam penyusunan dokumen rencana strategis, hal ini dikarenakan :

- a. Meningkatkan manfaat pembangunan;
- b. Rencana dan implementasi pembangunan lebih terjamin keberlanjutannya;
- c. Mengurangi kemungkinan kekeliruan dalam membuat prakiraan/prediksi pada awal proses perencanaan kebijakan, rencana, atau program pembangunan;

- d. Dampak negatif lingkungan ditingkat proyek pembangunan semakin efektif diatasi atau dicegah karena pertimbangan lingkungan telah dikaji sejak tahap formulasi kebijakan, rencana, atau program pembangunan.

BAB III
ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pengertian Isu Strtegis adalah kebijakan fundamental atau perhatian program yang menentukan situasi yang sangat penting dan pilihan pilihan program yang dihadapi organisasi pada waktu sekarang dan di masa depan. Isu Isu critical mencerminkan persoalan-persoalan yang berkepanjangan dalam organisasi, komunikasi yang dilayani atau kegiatan-kegiatan sekarang yang diantisipasi mempunyai dampak yang sangat nyata pada organisasi dan / atau komunitas yang dilayani. Secara singkat Isu strategis adalah persoalan Persoalan yang memiliki dampak signifikan terhadap masalah industri dan perdagangan yang mungkin diselesaikan dalam kurun waktu perencanaan. Isu Stategis merupakan keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu strategis dipengaruhi oleh permasalahan yang dirasakan berdasarkan capaian indikator kinerja, tupoksi, serta faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja dan beberapa faktor lain yang mungkin berpengaruh.

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen

Identifikasi permasalahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen sesuai tugas pokok dan fungsinya terkait pelayanan kepada masyarakat dicerminkan oleh indicator kinerja seperti: capaian realisasi belanja capaian penerbitan dokumen keuangan daerah tepat waktu, capaian tertib administrasi tepat waktu dan capaian realisasi pendapatan daerah. Secara lengkap identifikasi permasalahan berdasarkan hal tersebut di sajikan pada table 3.1.

Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Aspek Kajian	Capaian /Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			INTERNAL	EKSTER-NAL	
			(KEWENANGAN PD)	(DILUAR KEWENANGAN PD)	
Gambaran Pelayanan SKPD (Indik. program) 1. Capaian Realisasi Belanja	95%	SPM/IKK (96%)	Tim verifikator RKA/DPA	Perencanaan anggaran Kas dari PD yang belum tepat	Belum optimalnya kegiatan sosialisasi, evaluasi dan pengendalian dalam pelaksanaan APB

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			INTERNAL	EKSTER-NAL	
			(KEWENANGAN PD)	(DILUAR KEWENANGAN PD)	
2. Capaian Penerbitan Dokumen Keuangan Daerah tepat Waktu	100%	SPM/IKK (100%)	Proses entry RKA, DPA, DPPA	Proses Penetapan APBD, PAPBD	Belum optimalnya pencermatan dan pengendalian dalam penyusunan RKA/DPA PD
3. Capaian tertib administrasi tepat waktu	WTP	SPM/IKK (WTP)	- Kapasitas SDM pengelola aset daerah - Sistem pengelolaan keuangan	-Kapasitass SDM pengelola aset dan keuangan PD	- Belum optimalnya inventarisasi aset daerah - belum sempurnanya pengel keu basis akrual
4. Capaian Realisasi Pendapatan	106,38 %	SPM/IKK (100%)	- Pengawasan dan pengendalian pemungutan pajak /ret - Data obyek pajak	- Kesadaran Wajib pajak	- Laporan pajak dari WP belum semuanya sesuai standar - Tidak semua WP memahami IT pajak daerah
Kajian Renstra SKPD Provinsi terhadap Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota*) dan Renstra K/L	-	-	-	-	-
Kajian Renstra terhadap Hasil Telaahan Dokumen RT/RW	Tdk ada arahan	Dok RT/RW Kab Kbm	-	-	-
Kajian Renstra terhadap Hasil Analisis Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015	Tidak ada rekomendasi	Dok KLHS RPJMD kab Kbm 2016-2021	-	-	-

Berdasarkan tabel 3.1, dapat diidentifikasi permasalahan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen antara lain sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kegiatan sosialisasi, evaluasi dan pengendalian dalam pelaksanaan APBD
 Capaian realisasi belanja saat ini sudah cukup baik yaitu 95%, namun ke depannya agar tercapai sesuai target renstra, agar kegiatan pada perangkat daerah dapat disesuaikan dengan anggaran kasnya sehingga tidak terjadi deviasi yang besar. Di samping itu untuk kegiatan yang melibatkan pihak ketiga agar lebih diperhatikan dalam perencanaan dan pelaksanaannya supaya tidak terjadi penyerapan anggaran yang tidak sesuai. Oleh karena itu, DPPKAD perlu mengoptimalkan kegiatan koordinasi dan sosialisasi terkait pelaksanaan APBD dan tentunya perlu koordinasi dengan perangkat daerah yang mempunyai tupoksi dalam evaluasi dan pengendalian pelaksanaan APBD.

2. Belum optimalnya pencermatan dan pengendalian dalam penyusunan RKA/DPA Perangkat Daerah
3. Belum optimalnya inventarisasi aset daerah
4. Belum sempurnanya pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual

B. Identifikasi Isu Isu Strategis

Pada era sekarang ini, teknologi berkembang sangat pesat sehingga kita juga harus mengikuti perkembangan jaman. Beberapa issue strategis yang berupa dinamika internasional, nasional maupun provinsi harus selalu diikuti agar selalu dapat mengantisipasi hambatan-hambatan dan dapat menangkap peluang yang datang dari dunia internasional, nasional maupun provinsi serta dari berbagai informasi pengetahuan dan lain sebagainya yang dapat diakses melalui media sosial. Beberapa faktor eksternal yang dianggap sebagai issue strategis disajikan pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2. Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu Strategis		
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal Lain-lain
1	Sistem pengelolaan keuangan berbasis akrual telah digunakan di berbagai negara	Sering terjadi perubahan regulasi terkait pengelolaan keuangan dan struktur organisasi	belum sempurnanya pelaksanaan pengelolaan keuangan berbasis akrual di seluruh kab
2	Mulai dicanangkannya pasar bebas asean	Korupsi, kolusi dan nepotisme dikalangan aparatur pemerintah telah menjadi isu nasional	Intensifnya gerakan Tim Saber Pungli

C. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam melaksanakan tugas berdasarkan tugas pokok dan fungsi adalah adanya faktor penghambat dan faktor pendorong dalam pelayanan kepada masyarakat. Faktor tersebut dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen mendukung pencapaian Visi Kepala Daerah yaitu “Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan”. Adapun misinya ada 6 dimana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mendukung misi ke 3 dan 6 yang diimplementasikan melalui program dan kegiatan dalam kurun waktu 2016-2021.

Pada pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka mencapai visi misi itulah sering terjadi beberapa permasalahan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor baik faktor, penghambat maupun faktor pendorong, yang berupa faktor internal maupun eksternal. Secara

lebih rinci faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Visi: Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan				
No	Misi dan Program	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
	KDH dan Wakil KDH terpilih		Penghambat	Pendorong
1	Misi 3 :Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat			
a.	Pogram pengembangan industri Kecil Dan menengah			
b.	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan			
c.	Program peningkatan dan pengembangan efisiensi perdagangan dalam negeri			
2	Misi 6 : Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola kepemerin-tahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengeta-huan, pemahaman dan pendalaman agama.			
a.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kurangnyanya kuantitas SDM		
b.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Masih Kurangnya Sarana/Prasarana aparatur yang memadai		
c.	Program Pengembangan Data/Informasi	Belum semua SDM berperan aktif dalam proses penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan		
d.	Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah	Belum terdokumen-nya database secara kontinue dan up to date		
e.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur			
f.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya kegiatan sosialisasi, evaluasi dan pengendalian dalam pelaksanaan APBD - Belum optimalnya pencermatan dan pengendalian dalam penyusunan RKA/DPA PD - Belum optimalnya inventarisasi aset daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan anggaran Kas dari PD yang belum tepat - Proses entry RKA, DPA, DPPA yang tidak sesuai jadwal 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya kegiatan rakor Pop - Adanya tim verifikator RKA/DPA

		<ul style="list-style-type: none"> - Belum sempurna-nya pengelolaan keuangan ber basis akrual - Laporan pajak dari WP belum semuanya sesuai standar - Tidak semua WP memahami IT pajak daerah 		
g.	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan keuangan kabupaten/Kota			
h.	Program Peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH			

Catatan : untuk mengisi faktor penghambat dapat mengambil dari tabel 3.1 baik internal maupun eksternal yang bersifat negatif, sedangkan untuk faktor pendorong diambil yang bersifat positif.

Berdasarkan tabel 3.3, dapat diuraikan bahwa faktor penghambat dalam pencapaian misi antara lain :

1. Perencanaan anggaran Kas dari Organisasi Perangkat Daerah yang belum tepat

Didalam merencanakan anggaran kas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen pada dasarnya berpedoman dengan kebutuhan, waktu dan kegunaan namun sering terjadi keterlambatan dalam pengusulan pencairan.

2. Proses entry RKA, DPA, DPPA yang tidak sesuai jadwal

Didalam pengentrian baik RKA, DPA, DPPA, selalu tidak tepat waktu disebabkan karena terbentur oleh internet yang sering putus dan kurangnya sumber daya manusia.

Sedangkan faktor pendorong dalam pencapaian misi antara lain:

1. Adanya kegiatan Rakor Pop

Rakor Pop merupakan kegiatan koordinasi yang dilakukan di setiap organisasi perangkat daerah di tiap triwulan guna untuk mengetahui dan mendeteksi lebih dini keadaan target keuangan dan target fisik yang tercapai sehingga dapat diketahui deviasinya. Untuk itu maka sangatlah diperlukan kegiatan rakor pop internal di organisasi perangkat daerah sehingga dapat mengetahui seluruh kegiatan yang perlu di kejar untuk mendongkrak realisasi kegiatan yang deviasinya tinggi.

2. Adanya tim verifikator RKA/DPA

Tim verifikasi RKA/DPA sangat penting dan dibutuhkan agar program dan kegiatan yang ada dapat didanai sesuai dengan rencana dan kebutuhan.

Berdasarkan faktor penghambat dan pendorong dalam permasalahan pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen tersebut dapat ditentukan beberapa issue strategis antara lain :

1. Penambahan Sarana/Prasarana aparatur yang memadai
2. Optimalisasi proses penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan yang melibatkan seluruh SDM yang terkait
3. Penyusunan data base Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Kebumen secara kontinue dan uptodate
4. Peningkatan koordinasi dan sosialisasi kepada seluruh perangkat daerah agar pelaksanaan APBD lebih optimal
5. Peningkatan koordinasi dan sosialisasi kepada Tim Verifikasi untuk meningkatkan pencermatan dan pengendalian dalam penyusunan RKA/DPA Perangkat Daerah
6. Peningkatan koordinasi dan sosialisasi kepada perangkat daerah agar inventarisasi aset daerah dapat optimal
7. Penyempurnaan pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual melalui koordinasi dan sosialisasi kepada SDM perangkat daerah yang terkait
8. Peningkatan standar laporan dan pemahaman IT

BAB IV.

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, KEBIJAKAN

A. Visi

Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen mengacu pada Visi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen yaitu “Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan”.

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Bersama : bermakna bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan, seluruh komponen masyarakat dan pemerintah bergerak bersama-sama dan saling menguatkan sebagai sebuah kesatuan yang kokoh dan sinergis;
2. Menuju : bermakna bahwa dalam melaksanakan pembangunan senantiasa memiliki arah dan tujuan yang jelas dan terukur;
3. Sejahtera : bermakna bahwa pembangunan harus diorientasikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berupa pangan, sandang, papan (perumahan), kesehatan, pendidikan dan sosial sehingga tercipta kemanusiaan yang adil dan beradab;
4. Unggul : bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu mengembangkan dan menciptakan potensi daerah menjadi produk unggulan daerah yang berdaya saing tinggi;
5. Berdaya : bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang memiliki kekuatan, kemampuan dan tenaga serta memiliki solusi terbaik dalam menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi;
6. Agamis : bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan mengedepankan potensi intelektual dan rohaniah, yang dicirikan dengan sifat-sifat keimanan, ketakwaan, keadaban, keilmuan, kegigihan dalam kebaikan, kebenaran, dan persaudaraan;
7. Berkelanjutan : bermakna bahwa seluruh pembangunan harus dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi dengan baik serta memiliki keberlangsungan terus-menerus (berkesinambungan) sehingga tercipta pembangunan yang bermanfaat, berdaya guna bagi masyarakat dan berwawasan lingkungan.

B. Misi

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut:

1. Membangun sumberdaya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas;
2. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat;
3. Mengembangkan kemandirian perekonomian daerah yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal unggulan melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, industri, pariwisata dan sektor lainnya, dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta berwawasan lingkungan;
4. Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan;
5. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, meningkatkan nilai kualitas pendidikan serta membuka akses kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat; dan
6. Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama.

Dari 6 misi tersebut, Dinas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen dalam menjalankan tugas dan fungsinya terkait dengan misi 3 dan 6 yang diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan pembangunan.

C. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, diperlukan adanya kerangka yang jelas pada

setiap misi, menyangkut tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan, akan memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta indikator kinerja terkait pelayanan Dinas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen

Tujuan, sasaran, indikator sasaran daerah dan indikator program beserta target kinerja dan kerangka pendanaannya selama periode 2016-2021 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel 4.1

Tabel 4.1. Target Indikator Kinerja Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen

No.	Tujuan			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp. 000.000,-)							
							Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	
							Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	
1	2			6	7	8	9	11	13	15	17	19	21	
1	Meningkatkan sistem kerja yang profesional dan didukung oleh sarana dan prasarana serta SDM yang berkualitas	Meningkatnya sistem kerja yang lebih baik dengan didukung oleh tertib administrasi dan SDM yang berkualitas	Jumlah pegawai yang mempunyai kompetensi dan kualifikasi dalam bidang administrasi dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan dan tertib administrasi	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan kantor dan tertib administrasi									
				1	Penyediaan jasa surat menyurat;	Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	72 bulan
				2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik;	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	72 bulan
				3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional;	Tercapainya pemeliharaan dan BBM kendaraan dinas	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	72 bulan
				4	Penyediaan jasa administrasi keuangan;	Tercapainya penatausahaan keuangan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	72 Bulan
				5	Penyediaan jasa kebersihan kantor;	Tercapainya kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	72 Bulan
				6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;	Terpenuhinya perbaikan peralatan kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	72 Bulan
				7	Penyediaan alat tulis kantor;	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	72 Bulan

			8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	72 Bulan
			9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;	Terpenuhi penerangan kantor		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	72 Bulan
			10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;	Terpenuhi bahan bacaan		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	72 Bulan
			11	Penyediaan makanan dan minuman;	Terpenuhi kebutuhan makanan dan minuman untuk rapat tamu		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	72 Bulan
			12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;	Terseleenggaranya perjalanan luar daerah ke pusat dan provinsi		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	72 Bulan
			13	Penunjang administrasi kantor;	Tercapainya pemenuhan honor PTT		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	72 Bulan
			14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah;	Terseleenggaranya perjalanan dinas dalam daerah		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	72 Bulan
		Meningkatnya pelayanan publik yang didukung oleh sarana dan prasarana kantor yang memadai	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Tersedianya sarana dan prasarana kantor dan pasar dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat									
			1	Pembangunan Gedung Kantor	Terbangunnya gedung Gudang Kantor		-	1	-	1	-	-	-	2 unit
			2	Pengadaan kendaraan dinas operasional;	Terpenuhi kendaraan dinas operasional		3 unit Sepeda motor	4 unit sepeda motor	0	0	0	0	0	7
								1 pick up, 1 amrol	0	1 Unit Kendaraan Roda 4	1 Unit Kendaraan Roda 4	1 Unit Kendaraan Roda 4		5
			3	Pengadaan tanah;	Terpenuhi lokasi tanah untuk pembangunan pasar		1 lokasi	0	0	0	-	-	-	1

			4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;	Terpeliharanya gedung kantor		1 unit	1 gedung dan 1 tempat parkir	2	1	1		6
			5	Pengadaan perlengkapan kantor	Terpenuhinya perlengkapan kantor		2 unit AC dan 1 unit sound system	1 generator, 1 Stabiliser, 1 Tempata Baleho, 1 papan pengu muman, 8 vas Bunga, 3 White board, 6 AC.		1 Generator, 7 unit Amplifier, 21 unit Horn	7 unit Amplifier, 21 Unit Horn	7 unit Amplifier, 21 Unit Horn	81
			6	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terpenuhinya peralatan gedung kantor		mesin ketik (2 unit), lcd proyektor (1 unit), PC komputer (1 unit), laptop (1 unit), printer (1 unit)	4 PC, 4 Leptop, Printer A3, 2 Hardis External, Printer Laser Jet, 1 Handy cam, 1 Camera.	2 leptop	-	1 Komputer	-	22

				7	Pengadaan meubelair	Terpenuhinya meubel kantor		Almari kaca (2 unit), filling kabinet (2 unit), meja kerja (10 unit), kursi kerja staf (10 unit), kursi eselon (13 unit), sekat ukir (2 unit), lemari arsip mobil (5 unit)	48 unit kursi tamu 2 lemari kaca etalase , 12 meja rapat 8 kursi kerja 18 meja kerja 5 kursi eslon	4 Sofa UPTD dan mebul air di pasar - pasar daerah	-	-	-	131	
2	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan pengumpulan data base industri, perdagangan, dan pengelolaan pasar	Tersedianya dokumen perencanaan yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggung jawabkan	Jumlah dokumen perencanaan berkualitas yang dapat disusun		Program pengembangan data/informasi	Dokumen perencanaan, pelaporan, dan evaluasi									
				1	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersusunnya dokumen renja, renstra, LAKIP, LKPJ, LPPD, dan laporan progres target dan realisasi bulanan	6	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	30 dokumen
		Tersedianya database industri, perdagangan dan pasar yang mutakhir	Jumlah data base industri, perdagangan, dan pasar yang mutakhir dan berkualitas		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Data base yang mutakhir dan berkualitas									
				1	Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah	Tersusunnya data base industri, perdagangan dan pengelolaan pasar	0	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	15 dokumen

3	Pembuatan Kawasan Industri di Kabupaten Kebumen			Program Penataan Struktur Industri			-						
				Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Industri Daerah	Tersusunnya Sistem Informasi Industri Daerah, dan Penyiapan Pembangunan Kawasan Industri	Belum ada	-	Tersusunnya Naskah Akademik, Raperda RPIK, dan Sistem Informasi Industri Daerah	Sistem Informasi Industri Daerah (Update data) dan pembaharuan Raperda RPIK	Sistem Informasi Industri Daerah (Update data)	Sistem Informasi Industri Daerah (Update data)	Sistem Informasi Industri Daerah (Update data)	Tersusunnya Data-data Industri yang valid dan terupdate (1 dok)
								Penyusunan DED Kawasan Industri					1 Dok
4	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Kebumen			Program Pengembangan industri kecil dan menengah	Industri kecil dan menengah yang tangguh dan berdaya saing								

		Tercapainya pengembangan industri gula kelapa menjadi industri gula semut pada sentra gula kelapa di sekitar pantai selatan	Bertambahnya jumlah industri gula semut yang menghasilkan produk sesuai standar ekspor	1	Kegiatan Fasilitasi Industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	1	Terlaksananya bantuan peralatan dan pelatihan untuk pengembangan SDM bagi industri kecil gula semut supaya produk yang dihasilkan sesuai dengan standar ekspor dan bisa menjadi ikon Kab Kebumen	Industri kecil gula semut yang ada di Kabupaten Kebumen saat ini baru sekitar 200 unit usaha yang memproduksi gula semut secara berkelanjutan	4 kelompok	4 kelompok	4 kelompok	4 kelompok	4 kelompok	4 kelompok	24 Kelompok
							Terlaksananya fasilitasi / Pelatihan kegiatan industri kreatif berbasis sumber daya lokal	Belum ada	-	30 peserta / 1 Pelatihan 4 hari	30 peserta / 1 Pelatihan 4 hari	30 peserta / 1 Pelatihan 4 hari	30 peserta / 1 Pelatihan 4 hari	30 peserta / 1 Pelatihan 4 hari	6 kali pelatihan
				2	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri kecil dan menengah dengan swasta		Terjalinya kerjasama / kemitraan antara IKM dengan swasta dalam peningkatan jaringan pemasaran / Networking	Belum optimalnya kemitraan IKM dengan Swasta	-	-	-	10 IKM	10 IKM	10 IKM	30 IKM terfasilitasi kemitraan dengan pihak swasta
		Berkembangnya industri kecil dan menengah yang memiliki struktur industri yang kuat dengan kinerja yang efisien dan kompetitif di Kabupaten Kebumen	Jumlah IKM dengan produk yang mempunyai daya saing tinggi melalui peningkatan kemampuan kewirausahaan, ketersediaan bahan baku, dan tersedianya tenaga kerja yang berkualitas	1	Kegiatan Pembinaan Kemampuan ketrampilan kerja bagi industri kecil menengah di lingkungan IHT dan/atau daerah penghasil bahan baku IHT		Terlaksananya bantuan peralatan untuk IKM di Kabupaten Kebumen	IKM yang ada sebagian besar masih menggunakan peralatan yang tradisional, hanya sedikit yang sudah modern dan kemampuan SDM perlu ditingkatkan	5 Pelatihan	9 Pelatihan / Magang	7 Pelatihan, 1 Bantuan Alat	9 Pelatihan / Magang dan 2 Bantuan Alat	9 Pelatihan / Magang dan 2 Bantuan Alat	9 Pelatihan / Magang dan 2 Bantuan Alat	48 Pelatihan / magang 7 Bantuan alat
							Terlaksananya Pelatihan untuk IKM di Kabupaten Kebumen								

			2	Kegiatan pembinaan IKM dalam memperkuat jaringan klaster industri		Terlaksananya bantuan peralatan untuk IKM di Kabupaten Kebumen	IKM yang ada sebagian besar masih menggunakan peralatan yang tradisional, hanya sedikit yang sudah modern dan kemampuan SDM perlu ditingkatkan	6 paket	6 Pelatihan /Maga ng	5 pelati han / Maga ng	6 paket	7 paket	7 paket	37 pelatiha n /magan g/ paket	
			3	Kegiatan Pemberian Kemudahan izin usaha IKM		Tercapainya pemberian ijin PIRT bagi IKM	Masih banyaknya IKM yang belum memiliki ijin PIRT	200 KUB	250 KUB	300 KUB	350	400 KUB	400 KUB	1500 KUB	
				Program peningkatan kapasitas Iptek sistem produksi		Meningkatnya kesadaran IKM dalam menerapkan merek bagi produknya									
			1	Kegiatan Pengembangan Kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian, dan kualitas		Fasilitasi pembuatan merek bagi IKM di Kabupaten Kebumen dalam menghadapi persaingan dengan negara lain	Pola pikir sebagian besar masih sederhana, belum siap menghadapi pesaing global	15 IKM	20 IKM	25 IKM	30 IKM	35 IKM	35 IKM	160 IKM	
			2	Kegiatan Pengembangan Sistim Inovasi Teknologi Industri	1	Tersusunya database Industri kreatif, inovatif di Kebumen	Belum adanya database industri kreatif dan inovatif	-	160 IKM Industri Kreatif Inovatif	Berta mbah nya 40 IKM Industri Kreatif Inovatif	Berta mbah nya 50 IKM Industri Kreatif Inovatif	Berta mbah nya 50 IKM Industri Kreatif Inovatif	Berta mbah nya 50 IKM Industri Kreatif Inovatif	Berta mbah nya 50 IKM Industri Kreatif Inovatif	350 IKM Industri Kreatif Inovatif

					2	Fasilitasi Inovasi Teknologi, dan Industri Kreatif Inovatif	Belum terfasilitasi industri kreatif inovatif di kabupaten	-	16 Industri Kreatif Inovatif (Video, Kulinier, Fashion dan Desain Produk)	bertambahnya 4 Industri Kreatif Inovatif (Video, Kulinier, Fashion dan Desain Produk)	bertambahnya 4 Industri Kreatif Inovatif (Video, Kulinier, Fashion dan Desain Produk)	bertambahnya 4 Industri Kreatif Inovatif (Video, Kulinier, Fashion dan Desain Produk)	bertambahnya 4 Industri Kreatif Inovatif (Video, Kulinier, Fashion dan Desain Produk)	bertambahnya 4 Industri Kreatif Inovatif (Video, Kulinier, Fashion dan Desain Produk)	32 Industri Kreatif Inovatif (Video, Kulinier, Fashion dan Desain Produk)
		Meningkatnya industri kecil dan menengah yang menghasilkan produk sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI)	Jumlah IKM yang produknnya bestandar SNI	Program peningkatan kemampuan teknologi industri		Tersertifikasinya produk IKM yang dihasilkan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku									
				Kegiatan pembinaan kemampuan teknologi industri		Jumlah IKM yang layak untuk mendapatkan bantuan perijinan SNI/HAKI/merek barcode melalui sosialisasi	Sertifikasi produk IKM sebagian besar masih terabaikan	-	40 IKM	50 IKM	60 IKM	70 IKM	70 IKM	290 IKM	
						Jumlah bantuan perizinan/pendaftaran bagi ikm	Perizinan/pendaftaran SNI 5 IKM	-	5 IKM	5 IKM	5 IKM	5 IKM	5 IKM	25 IKM	
							Perizinan/pendaftaran HKI/merek 10 IKM	-	10 IKM	10 IKM	10 IKM	10 IKM	10 IKM	50 IKM	
							Perizinan/pendaftaran barcode 100 IKM	-	100 IKM	150 IKM	200 IKM	250 IKM	250 IKM	950 IKM	
		Memberikan informasi kepada masyarakat tentang sentra IKM	Jumlah wilayah/lokasi yang menerapkan reklame IKM	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial		IKM dapat memberikan informasi sentra-sentra industri potensial kepada masyarakat									

					Kegiatan penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	Jumlah sentra industri yang sudah menyediakan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat	Belum adanya informasi petunjuk sentra industri	-	6 IKM	8 IKM	10 IKM	10 IKM	10 IKM	44 IKM
		Meningkatnya penerapan inovasi dan teknologi modern pada IKM	Jumlah IKM yang menerapkan teknologi dalam proses produksinya		Program Pengembangan industri kecil dan menengah	Industri kecil dan menengah yang tangguh dan berdaya saing								
					Kegiatan penerapan IKM secara in-proses	Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan penerapan teknologi	Pelatihan proses produksi emban cincin 30 IKM	-	30 IKM	150 IKM				
						Jumlah IKM yang mengikuti studi banding	Studi banding proses produksi emban cincin 30 IKM	-	30 IKM	150 IKM				
							Bantuan peralatan untuk 10 IKM	-	3 IKM	15 IKM				
5	Meningkatkan pengendalian perusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh proses produksi di industri	Meningkatnya penerapan teknologi bersih pada proses produksi IKM	Jumlah IKM yang menerapkan teknologi bersih dalam proses produksinya		Program pengendalian dan perusakan lingkungan hidup	Terwujudnya IKM yang menerapkan teknologi bersih dan berwawasan lingkungan di Kab. Kebumen								
				1	Kegiatan penerapan IKM secara IN-Proses	Jumlah IKM yang mendapat pelatihan penerapan teknologi bersih		-	50 IKM	60 IKM	60 IKM	60 IKM	60 IKM	290 IKM
				2	kegiatan pengendalian dan perusakan lingkungan	Jumlah bantuan investasi peralatan bagi IKM		-	2 IKM	3 IKM	3 IKM	4 IKM	4 IKM	16 IKM

						Jumlah IKM yang mendapat pelatihan penerapan teknologi bersih		-	20 IKM	100 IKM					
						Jumlah investasi bantuan peralatan bagi IKM		-	3 IKM	4 IKM	5 IKM	6 IKM	6 IKM	24 IKM	
6	Pengembangan usaha melalui informasi perdagangan dan pengelolaan hasil pertanian	Terciptanya koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi/lembaga terkait dalam memperluas jaringan pemasaran dan pengelolaan gudang dengan sistem resi gudang	Jumlah pameran produk unggulan daerah yang diikuti dan pengelolaan gudang dengan sistem resi gudang		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Terlaksananya program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri di Kab. Kebumen									
				1	Kegiatan pengembangan pengelolaan gudang dengan sistem resi gudang	Pengembangan pengelolaan gudang dengan sistem resi gudang terlaksana dengan meningkatnya kemanfaatan gudang bagi usaha pertanian	Penyimpanan hasil usaha perdagangan sektor pertanian meningkat lebih dari 2 ton	terlaksananya pengelolaan gudang sistem resi gudang (SRG)	3 ton	4 ton	5 ton	6 ton	7 ton	25 Ton	
				2	Kegiatan peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Pengembangan usaha perdagangan melalui kegiatan-kegiatan pameran, promosi dan informasi perdagangan	Pelaksanaan pameran lebih dari 5 kali dalam setahun		7 kali	6 kali	6 kali	7 kali	8 kali	8 kali	35 Kali
				3	Kegiatan Kemudahan perizinan pengembangan usaha	Terwujudnya Fasilitasi perizinan pengembangan usaha bagi UKM	Pendampingan dalam pengembangan usaha UKM yang difasilitasi izin usaha barkot, halal, PIRT dan BPPOM 5		5 UKM	10 UKM	12 UKM	15 UKM	20 UKM	25 UKM	77 UKM

				4	Kegiatan Pengembangan Pasar Lelang Daerah	Terlaksananya pasar Lelang dalam upaya pengembangan peluang pasar produk unggulan dan terlaksananya sekolah Pasar	Pelaksanaan pasar lelang 4 Kali setahun dan terlaksananya Sekolah Pasar bagi pedagang pasar rakyat	0	0	40 Orang	60 Orang	80 Orang	100 Orang	280 Orang
		Terwujudnya efisiensi dan efektivitas sistem distribusi barang dan jasa untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pokok dan kebutuhan penting masyarakat	Jumlah pantauan/monitoring ketersediaan, harga, dan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat	5	Kegiatan pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	Terlaksananya program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Tercapainya peningkatan efisiensi perdagngan dalam negeri untuk kesejahteraan rakyat	Pantau an/monitoring harga, keterse dian dan distribusi Kepok mas di 5 (lima) pasar rakyat	Pantau an/monitoring harga, ketersediaan dan distribusi Kepok mas di 5 (lima) pasar rakyat	Panta uan/monit oring harga, keters edian dan dstribu si Kepok mas di 8 (delapan) pasar rakyat	Panta uan/monit oring harga, keters edian dan dstribu si Kepok mas di 8 (delapan) pasar rakyat	Panta uan/monit oring harga, keters edian dan dstribu si Kepok mas di 10 (sepuluh) pasar rakyat	Panta uan/monit oring harga, keters edian dan dstribu si Kepok mas di 10 (sepuluh) pasar rakyat	Terpen uhnya data Kepokm as dan barang penting 10 pasar daerah
7	Penataan, penertiban dan pemberdayaan PKL dan sejenisnya	Peningkatan penataan, penertiban, dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kab. Kebumen	Jumlah lokasi pedagang kaki lima yang telah ditata, ditertiban, dan diberdayakan di Kab. Kebumen		Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Tertatanya dan tertibnya PKL dan asongan di wilayah Kab. Kebumen								

				1	Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan	Terlaksananya penataan, penertiban, pemberdayaan PKL dan asongan	Banyaknya PKL dan asongan yang belum tertata dan tertib	1 Pembinaan PKL	2 Pembinaan PKL	4 Pembinaan PKL (Karanganyar, Prembun, Sruweng dan Petanahan)	2 Pembinaan PKL	2 Pembinaan PKL	2 Pembinaan PKL	13 pembinaan
				2	Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin PKL dan Asongan	Terlaksananya penyuluhan peningkatan disiplin PKL dan Asongan	Banyaknya PKL dan asongan yang tidak disiplin	-		2 Kec	3 Kec	3 Kec	3 Kec	11 Kecamatan
				3	Kegiatan penataan tempat berusaha bagi PKL dan Asongan	Terpenuhinya tempat berusaha bagi PKL dan asonga	Banyaknya PKL yang menempati usaha di area terlarang	-	0	2 Kec	2 Kec	2 Kec	2 Kec	8 Kec
				4	Kegiatan pengawasan mutu dagangan PKL dan Asongan	Terlaksananya pengawasan mutu dagangan PKL dan asongan	Banyaknya PKL yang belum paham perlunya mutu dagangan	-	-	3 Kec	3 Kec	3 Kec	3 Kec	12 Kec
				5	Kegiatan fasilitasi modal usaha bagi PKL dan Asongan	Terlaksananya fasilitasi modal usaha bagi PKL dan asongan	Banyaknya PKL dan asongan yang membutuhkan tambahan modal	-	-	-	50 PKL	100 PKL	150 PKL	300 PKL

8	Terwujudnya keamanan, keselamatan dan kenyamanan konsumen	Terwujudnya barang dan/atau jasa yang beredar di pasaran yang aman, sehat, dan tidak kadaluwarsa serta terhindar dari barang palsu atau dipalsukan	Jumlah barang dan jasa di pasaran yang tidak memenuhi syarat/standar	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Terwujudnya program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan di Kab. Kebumen									
				1	Kegiatan peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Terlaksananya pengawasan terhadap barang dan jasa beredar di pasaran	Tercapainya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Pengawasan barang dan jasa beredar di 26 kecamatan	Pengawasan barang dan jasa beredar di 26 kecamatan	Pengawasan barang dan jasa beredar di 26 kecamatan	Pengawasan barang dan jasa beredar di 26 kecamatan	Pengawasan barang dan jasa beredar di 26 kecamatan	Pengawasan barang dan jasa beredar di 26 kecamatan	26 Kecamatan
		Terpenuhinya hak-hak konsumen dan penyelesaian sengketa konsumen		2	Kegiatan fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen	Terpenuhinya pelayanan pengaduan dan sengketa konsumen	Tercapainya hak-hak konsumen	120 pengaduan	0	0	0	0	0	Pelaku usaha bersikap jujur dan bertanggung jawab
		Terwujudnya tertib niaga, tertib ukur, takar, timbng, dan perlengkapannya (UTTP)	Jumlah Alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang legal	3	Kegiatan operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrolgian daerah	Terlaksananya tera ulang alat UTTP	Terpenuhinya alat UTTP yang legal	Pengawasan tera ulang di 26 kecamatan	26 Kecamatan					

		Peningkatan pengetahuan pelaku usaha dalam memahami peraturan di bidang cukai	Jumlah pengawasan rokok dengan pita cukai ilegal	4	Kegiatan Pengumpulan informasi pita cukai ilegal atau tidak dilekati pita cukai	Terlaksananya pengawasan peredaran pita cukai ilegal	Terpenuhi nya produk rokok dengan pita cukai ilegal	Terpenuhi nya produk rokok dengan pita cukai ilegal di 26 kecamatan	Terpenuhi nya produk rokok dengan pita cukai ilegal di 26 kecamatan	Terpenuhi nya produk rokok dengan pita cukai ilegal di 26 kecamatan	Terpenuhi nya produk rokok dengan pita cukai ilegal di 26 kecamatan	Terpenuhi nya produk rokok dengan pita cukai ilegal di 26 kecamatan	Terpenuhi nya produk rokok dengan pita cukai ilegal di 26 kecamatan	26 Kecamatan
9	Meningkatnya target pendapatan asli daerah	Tercapainya target pendapatan daerah di pasar-pasar daerah	Tercapainya target retribusi pelayanan pasar, retribusi kebersihan pasar, retribusi parkir di 4 UPTD Pasar Daerah		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Tercapainya realisasi PAD yang telah ditargetkan								
				1	kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Tercapainya target pendapatan keuangan daerah		4 UPTD Pasar	4 UPTD Pasar					
				2	Kegiatan fasilitasi peningkatan PAD	Peningkatan retribusi pelayanan pasar, retribusi kebersihan pasar, retribusi parkir		-	4 UPTD Pasar	4 UPTD Pasar				
10	Tersusunnya Perda tentang pengelolaan pasar daerah	Tersusunnya Perda tentang pengelolaan pasar-pasar daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	Jumlah Perda tentang pasar daerah yang akan tersusun		Program penataan peraturan perundang-undangan	Tersusunnya Perda tentang pengelolaan pasar di Kab. Kebumen								
					Kegiatan legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	Terusunnya Perda tentang (6 perda) :		6 Perda	3 Perda	2 Perda	5 perda	5 perda		21 perda
						1 Tata letak bangunan pasar								
						2 Pengelolaan pasar								
						3 Pengelolaan pasar grosir dan pertokoan								

					4	Retribusi pengelolaan pasar								
					5	Retribusi pengelolaan pasar grosir dan pertokoan								
					6	Perda PKL								
		Tersosialisasinya perda tentang pengelolaan pasar-pasar daerah	Jumlah Perda Tentang pasar-pasar daerah yang disosialisasikan	Program penataan peraturan perundang-undangan		Tersosialisasinya perda tentang pasar kepada masyarakat								
				Sosialisasi peraturan perundang-undangan		Tersosialisasinya 6 Perda tentang pasar dan PKL	6 Perda	3 Perda	2 Perda	5 Perda	5 perda			21 perda
11	Mendukung peningkatan pelayanan pada masyarakat di bidang penyediaan dan pengaturan fasilitasi perdagangan	Meningkatnya kualitas pelayanan kebersihan pasar daerah melalui pengelolaan persampahan	Jumlah pasar daerah yang bersih	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Tersedianya sarana dan prasarana kantor dan pasar dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat								
				Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kebersihan pasar		Tersedianya sarana dan prasarana peralatan kebersihan pasar tradisional	4 UPTD Pasar	4 UPTD Pasar	4 UPTD Pasar	4 UPTD Pasar	4 UPTD Pasar	4 UPTD Pasar	4 UPTD Pasar	4 UPTD Pasar
			Jumlah pasar yang menyediakan pengelolaan persampahan	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan		Tersedianya sarana prasarana pengolahan persampahan yang modern								
				Kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan		Terpenuhinya prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	4 UPTD Pasar	4 UPTD Pasar	4 UPTD Pasar	4 UPTD Pasar	4 UPTD Pasar	4 UPTD Pasar	4 UPTD Pasar	4 UPTD Pasar
	Pengembangan usaha melalui informasi perdagangan dan pengelolaan hasil pertanian	Terlaksanannya pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri		program peningkatan dan pengembangan ekspor		terlaksanannya pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri								
				1 Kegiatan pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri		Tepenuhinya informasi peluang pasar luar negeri	1 IKM	0	1 Kali Pameran	1 Kali pameran	3 Kali pameran	3 Kali pameran	3 Kali pameran	11 Pameran

				2	Membangun jejaring dengan ekportir	Adanya eksportir di kabupaten kebumen	1 Ekportir	0	1 Ekportir	1 Ekportir	2 eksportir	3 Eksportir	3 Eksportir	10 Ekportir
		Tersedianya petugas untuk kebersihan dan keamanan pasar	Jumlah petugas kebersihan dan kemanan pasar daerah		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Terlaksananya program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri di Kab. Kebumen								
					Kegiatan pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan	Terpenuhinya kebersihan dan keamanan pasar		64 orang	166 orang	208 orang	208 orang	208 orang	208 orang	208 orang
		Terwujudnya efisiensi dan efektivitas sistem distribusi barang dan jasa untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pokok dan kebutuhan penting masyarakat			Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Terlaksananya program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri di Kab. Kebumen								
			Penambahan pasar tradisional/pasar daerah baru		Pemeliharaan/rehabilitasi pasar-pasar daerah	- Jumlah pasar daerah baru yang dibangun	Lahan tersedia untuk pasar Pon Padureso dan pasr burung dan Klitikan					1 Pasar Padureso	1 Pasar Burung dan Klitikan	2 Pasar Daerah
			Pasar tradisional direnovasi/ direhabilitasi			- Renovasi/rehabilitasi pasar-pasar daerah	Dinding pasar cat yang pudar, pagar pasar belum ada, penambahan kios, drainase kurang lancar, hidrant belum ada, cctv belum ada, informasi harga belum ada, penambahan los, talang pasar	4 pasar	5 pasar (Ambal, Indara kila, Ayah, Tumenggung an dan pasar Hewan Karan ganyar)	360 Unit Blower untuk 9 Pasar Daerah dan Rehab Rehab pasar Daerah untuk 4 UPTD Pasar	4 UPTD Pasar	4 UPTD Pasar	4 UPTD Pasar	4 UPTD Pasar

			Revitalisasi / pembangunan			-	Revitalisasi/pembangunan pasar daerah yang sudah ada	Pasar kondisi rusak	1 pasar	2 pasar (Ungaran, Caruban)	4 pasar (jogosi mo, Hewan Argopeni, Puringg dan Kritig.)	5 pasar (Jogosimo,	3 pasar	3 pasar	18 Pasar
			Terpeliharanya pasar-pasar daerah			-	Terpeliharanya pasar-pasar daerah,	Sarana prasarana pasar kondisinya memerlukan pemeliharaan,	4 UPTD Pasar	4 UPTD Pasar	4 UPTD Pasar	4 UPTD Pasar	4 UPTD Pasar	4 UPTD Pasar	4 UPTD Pasar
						-	DED Pembangunan Pasar Jogosimo			1 Pasar Jogosimo					
						-	Review DED Pasar Puring			1 Pasar Puring					
						-	Asuransi Pasar			17 Pasar	20 Pasar	25 Pasar	30 Pasar	35 pasar	35 Pasar

A. Perumusan Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah. Oleh karena itu, strategi dan arah kebijakan digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja perangkat daerah. Perencanaan yang baik disusun dengan mengagendakan aktivitas pembangunan dengan segala program yang mendukung dan menciptakan layanan kepada masyarakat. Salah satu poin penting dalam aktivitas tersebut adalah upaya memperbaiki kinerja, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi sehingga pembangunan daerah yang merata ke seluruh masyarakat dapat terwujud.

Penentuan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan, memerlukan analisis lingkungan yang mempertimbangkan faktor internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri atas kekuatan dan kelemahan. Sedangkan faktor lingkungan eksternal terdiri dari peluang dan ancaman. Analisis ini diperlukan sebagai media untuk memastikan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan melalui penetapan tujuan (*goal*) dan sasaran (*objective*) pembangunan daerah yang ingin dicapai serta strateginya dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Proses identifikasi analisis lingkungan ini menggunakan metode analisis SWOT dengan melibatkan seluruh komponen yang terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah kemudian masukan masyarakat tersebut dihimpun dan dianalisis.

Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat dalam menciptakan nilai, di lain pihak, strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati. Rumusan strategi dijadikan sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Hasil rumusan strategi dan arah kebijakan berdasarkan masukan dari komponen masyarakat terkait disajikan pada tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan.			
MISI III : Mengembangkan kemandirian perekonomian daerah yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal unggulan melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, industri, pariwisata dan sektor lainnya, dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta berwawasan lingkungan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Meningkatkan sistem kerja yang professional dan didukung oleh sarana dan prasarana serta SDM yang berkualitas.	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya sistem kerja yang lebih baik dengan didukung oleh tertib administrasi dan SDM yang berkualitas; b. Meningkatnya pelayanan publik yang didukung oleh sarana dan prasarana kantor yang memadai. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Terciptanya sistem kerja yang lebih baik yang didukung oleh sarana prasarana dan SDM yang berkualitas; b. Peningkatan pelayanan publik yang didukung oleh sarana dan prasarana kantor yang memadai. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyediakan SDM Aparatur yang professional untuk pengelola keuangan dan tertib administrasi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. b. Melakukan inventarisir/manajemen sarana prasarana dan pemenuhan kebutuhan tata laksana perkantoran; c. Menyelenggaraan tata kelola dan pemeliharaan gedung kantor dan pasar secara maksimal.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan pengumpulan data base industri perdagangan dan pengelolaan pasar.	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedianya dokumen perencanaan yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan; b. Tersedianya database industri, perdagangan, dan pasar. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedianya dokumen perencanaan yang partisipatif dan berkualitas serta dapat dipertanggungjawabkan secara benar dan tepat; 	<ul style="list-style-type: none"> b. Melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pemantapan perencanaan yang berkualitas; c. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan secara berkala.
3. Pembuatan kawasan industri di Kabupaten Kebumen.	<ul style="list-style-type: none"> a. Terlaksananya Fasilitasi terhadap industri besar yang akan membuka usahanya di Kabupaten Kebumen. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyediakan database yang akurat, mutakhir, dan berkala b. Membentuk kawasan industry di Kabupaten Kebumen 	<ul style="list-style-type: none"> a. Membuat database industry, perdagangan, dan pasar yang valid dan update secara berkala. b. Adanya wilayah di Kabupaten Kebumen yang sudah ditetapkan sebagai zona industry yang dapat dibangun menjadi kawasan industry dalam RTRW Kab. Kebumen
4. Pengembangan industri kecil dan menengah di Kabupaten Kebumen.	<ul style="list-style-type: none"> b. Tercapainya pengembangan industri gula kelapa menjadi industri gula semut pada sentra gula kelapa di sekitar pantai selatan; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan industry gula semut di Kabupaten Kebumen. b. Meningkatkan daya saing produk industry 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan industry gula kelapa menjadi industry gula semut pada sentra gula kelapa di sekitar pantai selatan melalui pelatihan dan bantuan mesin/peralatan.

	<ul style="list-style-type: none"> b. Berkembangnya industri kecil dan menengah yang memiliki struktur industri yang kuat dengan kinerja yang efisien dan kompetitif di Kabupaten Kebumen; b. Meningkatnya industri kecil dan menengah yang menghasilkan produk sesuai standar nasional indonesia; c. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang sentra industri kecil dan menengah; d. Meningkatnya penerapan inovasi dan teknologi modern pada industri kecil dan menengah. 		<ul style="list-style-type: none"> b. Pengembangan ketrampilan dan kualitas SDM tenaga kerja melalui pelatihan; c. Peningkatan penguasaan teknologi modern dan inovasi roduk melalui bantuan mesin/peralatan produksi; d. Produk yang dihasilkan IKM sudah memiliki brand image dan merek sendiri; e. Meningkatnya daya saing produk industri kecil dan menengah (IKM) yang berbasis sumber daya lokal baik pengolahan hasil pertanian maupun non pertanian untuk meningkatkan perekonomian daerah.
5. Pengembangan usaha melalui informasi perdagangan dan pengelolaan hasil pertanian.	<ul style="list-style-type: none"> a. Terciptanya koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi/lembaga terkait dalam memperluas jaringan pemasaran dan pengelolaan gudang dengan sistem resi gudang; b. Terwujudnya efisiensi dan efektivitas sistem distribusi brang dan jasa untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pokok dan kebutuhan penting masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperluas jaringan pemasaran produk unggulan daerah dan pengelolaan gudang dengan sistem resi gudang. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan fasilitasi dan informasi pameran di tingkat local, jawa, dan luar jawa bagi IKM untuk memperluas jaringan bisnis, promosi untuk memasarkan produk unggulan dan meningkatkan omset penjualan bagi IKM; b. Sosialisasi kepada petani yang bekerjasama dengan dinas terkait gar petani dapat memanfaatkan gudang dengan sistem resi gudang (SRG) supaya dapat berfungsi secara optimal dengan melengkapi sarana dan prasarana pendukung.

<p>6. Penataan, penertiban, dan pemberdayaan pedagang kakilima (PKL) dan sejenisnya.</p> <p>7. Peningkatan penataan, penertiban, dan pemberdayaan pedagang kakilima di Kabupaten Kebumen.</p>	<p>a. Peningkatan penataan, penertiban, dan pemberdayaan pedagang kakilima di Kabupaten Kebumen.</p> <p>b. Terwujudnya barang dan/atau jasa yang beredar di pasaran yang aman, sehat, dan tidak kadaluwarsa serta terhindari dari barang palsu atau dipalsukan;</p>	<p>c. Penataan dan penertiban pedagang kakilima di Kabupaten Kebumen</p>	<p>a. Pembinaan, penataan, dan pemberian fasilitas bagi pedagang kakilima serta penyusunan regulasi tentang PKL di Kabupaten Kebumen.</p>
<p>8. Terpenuhinya hak-hak konsumen Terwujudnya keamanan, keselamatan, dan kenyamanan konsumen</p>	<p>a. penyelesaian sengketa konsumen dengan produsen;</p> <p>b. Terwujudnya tertib niaga, tertib ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP);</p> <p>c. Peningkatan pengetahuan pelaku usaha dalam memahami peraturan di bidang cukai.</p>	<p>d. Mewujudkan sistem distribusi barang dan jasa untuk menjamin pemenuhan kebutuhan produk dan kebutuhan penting masyarakat;</p> <p>e. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa dalam rangka perlindungan konsumen.</p>	<p>a. Penyediaan informasi mengenai harga kebutuhan pokok masyarakat serta barang-barang strategis lainnya secara kontinyu.</p> <p>b. Sosialisasi dan pembinaan kepada pelaku usaha agar kelancaran distribusi barang dan jasa hasil produksi dan kebutuhan kepada masyarakat sesuai dengan perundang-undangan;</p> <p>c. Pembinaan terhadap pelaku usaha supaya memahami hak, tugas, dan tanggung jawabnya;</p> <p>d. Pembinaan bagi masyarakat dan pelaku usaha sebagai upaya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan;</p> <p>e. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan/atau jasa;</p> <p>f. Membuat data yang valid tentang perdagangan di Kabupaten Kebumen;</p> <p>g. Peningkatan koordinasi dengan stakeholder, pembinaan dan pemantauan terhadap pelaku usaha (agen, distributor, SPBU, pangkalan, pengecer, dsb);</p> <p>h. Meningkatkan pelayanan kemetrolgian.</p>

9. Meningkatnya target pendapatan asli daerah	i. Tercapainya target pendapatan daerah di pasar-pasar daerah	a. Meningkatnya target pendapatan asli daerah di bidang pengelolaan pasar daerah.	a. Tercapainya target pendapatan asli daerah melalui retribusi pelayanan pasar, retribusi kebersihan pasar, retribusi parkir khusus.
10. Tersusunnya peraturan daerah tentang pengelolaan pasar-pasar daerah	a. Tersusunnya peraturan daerah tentang pengelolaan pasar-pasar daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; b. Tersosialisasinya perda tentang pengelolaan pasar daerah.	a. Meningkatkan pelayanan pasarpasar daerah. b. Meningkatnya kualitas pelayanan kebersihan dan keamanan pasar-pasar daerah;	a. Menyusun peratran daerah tentang pengelolaan pasar daerah; b. Sosialisasi peraturan daerah tentang pengelolaan pasar. c. Meningkatkan pelayanan kebersihan pasar dan pembangunan unit pengolahan persampahan; d. Menambah jumlah tenaga kebersihan dan keamanan pasar.
11. Revitalisasi pasar-pasar daerah untuk menggerakkan perekonomian rakyat	a. Meningkatnya kualitas pelayanan kebersihan pasar daerah melalui pengelolaan persampahan; b. Tersedianya petugas untuk kebersihan dan keamanan pasar; c. Meningkatkan kondisi pasar yang bersih, indah, aman, dan nyaman sebagai penggerak perekonomian rakyat.	a. Merevitalisasi pasar-pasar daerah	a. Revitalisasi pasar rakyat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan pembangunan pasar yang diharapkan dapat merubah tampilan pasar rakyat menjadi lebih bersih, aman, nyaman, dan teratur sehingga dapat bersaing dengan pasar modern.

Berdasarkan tabel di atas maka beberapa kebijakan yang akan dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen antara lain :

1. Terciptanya sistem kerja yang lebih baik yang didukung oleh sarana prasarana dan SDM yang berkualitas;
Kebijakan :
Menyediakan SDM Aparatur yang professional untuk pengelola keuangan dan tertib administrasi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
2. Peningkatan pelayanan publik yang didukung oleh sarana dan prasarana kantor yang memadai.
Kebijakan :
 - a. Melakukan inventarisir/manajemen sarana prasarana dan pemenuhan kebutuhan tata laksana perkantoran;
 - b. Menyelenggaraan tata kelola dan pemeliharaan gedung kantor dan pasar secara maksimal.
3. Tersedianya dokumen perencanaan yang partisipatif dan berkualitas serta dapat dipertanggungjawabkan secara benar dan tepat;
Kebijakan :
 - d. Melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pemantapan perencanaan yang berkualitas;
 - e. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan secara berkala.
4. Menyediakan database yang akurat, mutakhir, dan berkala
Kebijakan :
Membuat database industry, perdagangan, dan pasar yang valid dan update secara berkala.
5. Membentuk kawasan industry di Kabupaten Kebumen
Kebijakan :
Adanya wilayah di Kabupaten Kebumen yang sudah ditetapkan sebagai zona industry yang dapat dibangun menjadi kawasan industry dalam RTRW Kab. Kebumen
6. Mengembangkan industry gula semut di Kabupaten Kebumen.
Kebijakan :
Pengembangan industry gula kelapa menjadi industry gula semut pada sentra gula kelapa di sekitar pantai selatan melalui pelatihan dan bantuan mesin/peralatan.
7. Meningkatkan daya saing produk industry
Kebijakan :
 - a. Pengembangan ketrampilan dan kualitas SDM tenaga kerja melalui pelatihan;
 - b. Peningkatan penguasaan teknologi modern dan inovasi roduk melalui bantuan mesin/peralatan produksi;
 - c. Produk yang dihasilkan IKM sudah memiliki brand image dan merek sendiri;
 - d. Meningkatnya daya saing produk industri kecil dan menengah (IKM) yang berbasis sumber daya lokal baik pengolahan hasil

- pertanian maupun non pertanian untuk meningkatkan perekonomian daerah.
8. Memperluas jaringan pemasaran produk unggulan daerah dan pengelolaan gudang dengan sistem resi gudang.
Kegiatan :
- c. Memberikan fasilitasi dan informasi pameran di tingkat local, jawa, dan luar jawa bagi IKM untuk memperluas jaringan bisnis, promosi untuk memasarkan produk unggulan dan meningkatkan omset penjualan bagi IKM;
 - d. Sosialisasi kepada petani yang bekerjasama dengan dinas terkait gar petani dapat memanfaatkan gudang dengan sistem resi gudang (SRG) supaya dapat berfungsi secara optimal dengan melengkapi sarana dan prasarana pendukung.
9. Mewujudkan sistem distribusi barang dan jasa untuk menjamin pemenuhan kebutuhan produk dan kebutuhan penting masyarakat;
Kebijakan :
Penyediaan informasi mengenai harga kebutuhan pokok masyarakat serta barang-barang strategis lainnya secara kontinyu.
10. Penataan dan penertiban pedagang kakilima di Kabupaten Kebumen
Kebijakan :
Pembinaan, penataan, dan pemberian fasilitas bagi pedagang kakilima serta penyusunan regulasi tentang PKL di Kabupaten Kebumen.
11. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa dalam rangka perlindungan konsumen.
Kebijakan :
a. Sosialisasi dan pembinaan kepada pelaku usaha agar kelancaran distriusi brang dan jasa hasil produksi dan kebutuhan kepada masyarakat sesuai dengan perundang-undangan;
b. Pembinaan terhadap pelaku usaha supaya memahami hak, tugas, dan tanggung jawabnya;
c. Pembinaan bagi masyarakat dan pelaku usaha sebagai upaya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan;
d. Peningkatan pengawasan peredaran barng dan/atau jasa;
e. Membuat data yang valid tentang perdagangan di Kabupaten Kebumen;
f. Peningkatan koordinasi dengan stakeholder, pembinaan dan pemantauan terhadap pelaku usaha (agen, distributor, SPBU, pangkalan, pengecer, dsb);
g. Meningkatkan pelayanan kemetrologian.
12. Meningkatkan target pendapatan asli daerah di bidang pengelolaan pasar daerah.
Kebijakan :
Tercapainya target pendapatan asli daerah melalui retribusi pelayanan pasar, retribusi kebersihan pasar, retribusi parkir khusus.
13. Meningkatkan pelayanan pasarpasar daerah.
Kebijakan :
e. Menyusun peratran daerah tentang pengelolaan pasar daerah;

- f. Sosialisasi peraturan daerah tentang pengelolaan pasar.
14. Meningkatnya kualitas pelayanan kebersihan dan keamanan pasar-pasar daerah;
- Kebijakan :
- a. Meningkatkan pelayanan kebersihan pasar dan pembangunan unit pengolahan persampahan;
 - b. Menambah jumlah tenaga kebersihan dan keamanan pasar.
15. Merevitalisasi pasar-pasar daerah
- Kebijakan :
- Revitalisasi pasar rakyat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan pembangunan pasar yang diharapkan dapat merubah tampilan pasar rakyat menjadi lebih bersih, aman, nyaman, dan teratur sehingga dapat bersaing dengan pasar modern.

BAB V.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen berisi program-program untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan satuan kerja perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (*outcome*) di masing-masing urusan sesungguhnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen, tetapi juga dari sumber pendanaan lainnya (Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

Program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati serta program pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten.

Perumusan rencana program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan kerangka pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif berdasar urusan pemerintahan daerah. Gambaran pembagian urusan masih mengacu pada Lampiran Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

A. Rencana Program

Program yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2016-2021 Dinas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Pengembangan Data/Informasi.
4. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah.
5. Program Penataan Struktur Industri.
6. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
7. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi
8. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
9. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial

10. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
11. Program Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Perdagangan
12. Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan
13. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
14. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
15. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

B. Rencana Kegiatan

Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2016-2021 Dinas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan jasa surat menyurat;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
3. Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
6. Penyediaan Jasa Pebaikan Peralatan Kerja;
7. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
11. Penyediaan Makanan dan Minuman;
12. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
13. Penunjang Administrasi Perkantoran;
14. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah.
15. Pembangunan Gedung Kantor;
16. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional;
17. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
18. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
19. Pengadaan Mebeleur;
20. Pengadaan Tanah;
21. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kebersihan Pasar.
23. Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuh Penyusunan Dokumen Perencanaan
24. Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah.
25. Fasilitasi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya;
26. Pembinaan kemampuan ketrampilan kerja bagi industri kecil menengah di lingkungan IHT dan/atau daerah penghasil bahan baku industri;
27. Pembinaan IKM dalam memperkuat jaringan klaster industri;
28. Pemberian kemudahan izin usaha IKM.
29. Pengembangan kapasitas pranata pengukuran standarisasi, pengujian dan kualitas.

30. Pembinaan kemampuan teknologi industri;
31. Kegiatan penyediaan sarana informasi yang diakses masyarakat.
32. Fasilitasi Kemudahan Perijinan pengembangan usaha;
33. Pengembangan pengelolaan gudang dengan sistem resi gudang;
34. Peningkatan dan jaringan informasi perdagangan;
35. Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk;
36. Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan;
37. Pemeliharaan/rehabilitasi pasar-pasar daerah.
38. Peningkatan Pengawasan peredaran barang dan jasa;
39. Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan-Permasalahan Pengaduan Konsumen;
40. Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrolgian daerah;
41. Pengumpulan Informasi Pita Cukai Illegal dan tidak dilekati Pita Cukai.
42. Pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan;
43. Penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan;
44. Penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan;
45. Pengawasan mutu dagangan pedagang kakilima dan asongan.
46. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
47. Fasilitasi peningkatan pendapatan asli daerah.
48. Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan;
49. Sosialisasi peraturan perundang-undangan.
50. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan.

Secara lengkap, daftar program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan kerangka pendanaannya dituangkan berdasarkan Misi Tujuan dan sasaran serta indikator kinerja daerah disajikan pada Tabel 5.1

Tabel 5.1.
Matrik Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Program dan Kegiatan OPD beserta Rencana Pendanaannya
Tahun 2016-2021

No.	Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kinerja program dan kerangka pendanaan(Rp 000.000,-)						
					Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
					Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	
1	2		6	7	10	12	14	16	18	20	
1	Meningkatkan sistem kerja yang profesional dan didukung oleh sarana dan prasarana serta SDM yang berkualitas	Meningkatnya sistem kerja yang lebih baik dengan didukung oleh tertib administrasi dan SDM yang berkualitas	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan kantor dan tertib administrasi							
			1	Penyediaan jasa surat menyurat;	Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun	5	4,4	4	5	5	5
			2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik;	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	420	465	462	600	660	660
			3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional;	Tercapainya pemeliharaan dan BBM kendaraan dinas	93.5	156,5	110	200	250	300
			4	Penyediaan jasa administrasi keuangan;	Tercapainya penatausahaan keuangan	92	93	102,3	120	130	130
			5	Penyediaan jasa kebersihan kantor;	Tercapainya kebersihan kantor	7	8	7.7	10	11	11
			6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;	Terpenuhinya perbaikan peralatan kantor	25	27.5	27.5	35	40	40
			7	Penyediaan alat tulis kantor;	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	40	40	44	55	60	60
			8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	300	330	346.94	215	215	215
			9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;	Terpenuhinya penerangan kantor	25	27.5	27.5	35	40	40
			10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;	Terpenuhinya bahan bacaan	5	5.5	5,5	6.75	7.5	7.5

			11	Penyediaan makanan dan minuman;	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman untuk rapat tamu	30	33	33	40	45	45
			12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;	Terselenggaranya perjalanan luar daerah ke pusat dan provinsi	125	125	137,5	200	225	225
			13	Penunjang administrasi kantor;	Tercapainya pemenuhan honor PTT	315.9	347.5	382	420.5	462.5	462.5
			14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah;	Terselenggaranya perjalanan dinas dalam daerah	30	30	33	40	45	45
		Meningkatnya pelayanan publik yang didukung oleh sarana dan prasarana kantor yang memadai	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Tersedianya sarana dan prasarana kantor dan pasar dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat						
			1	Pembangunan Gedung Kantor	Terbangunnya gedung Gudang Kantor		810		4.100		
			2	Pengadaan kendaraan dinas operasional;	Terpenuhinya kendaraan dinas operasional	52,5	825	1.480	300	300	
			3	Pengadaan tanah;	Terpenuhinya lokasi tanah untuk pembangunan pasar	8.000	0	2.500	0	0	0
			4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;	Terpeliharanya gedung kantor	25	90	150	200	200	200
			5	Pengadaan perlengkapan kantor	Terpenuhinya perlengkapan kantor	26,95	90	0	280	30	30
			6	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terpenuhinya peralatan gedung kantor	264,842	120	53,451	125	50	25
			7	Pengadaan meubelair	Terpenuhinya meubel kantor	192,0915	100	200	280	30	30
2	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan pengumpulan data base industri, perdagangan, dan pengelolaan pasar	Tersedianya dokumen perencanaan yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggung jawabkan	Program pengembangan data/informasi		Dokumen perencanaan, pelaporan, dan evaluasi						
			1	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersusunnya dokumen renja, renstra, LAKIP, LKPJ, LPPD, dan laporan progres target dan realisasi bulanan	192,0915	100	200	0	0	0
		Tersedianya database industri, perdagangan dan pasar yang mutakhir	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah		Data base yang mutakhir dan berkualitas						
			1	Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah	Tersusunnya data base industri, perdagangan dan pengelolaan pasar	40	60	75	70	80	80

3	Pembuatan Kawasan Industri di Kabupaten Kebumen		Program Penataan Struktur Industri									
				Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Industri Daerah	Tersusunnya Sistem Informasi Industri Daerah, dan Penyiapan Pembangunan Kawasan Industri	10	30	35	35	35	35	
4	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Kebumen			Program Pengembangan industri kecil dan menengah	Industri kecil dan menengah yang tangguh dan berdaya saing	0	300	100	60	70	80	
		Tercapainya pengembangan industri gula kelapa menjadi industri gula semut pada sentra gula kelapa di sekitar pantai selatan	1	Kegiatan Fasilitasi Industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	1 Terlaksananya bantuan peralatan dan pelatihan untuk pengembangan SDM bagi industri kecil gula semut supaya produk yang dihasilkan sesuai dengan standar ekspor dan bisa menjadi ikon Kab Kebumen		50					
					Terlaksananya fasilitasi / Pelatihan kegiatan industri kreatif berbasis sumber daya lokal							
			2	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri kecil dan menengah dengan swasta	Terjalinya kerjasama / kemitraan antara IKM dengan swasta dalam peningkatan jaringan pemasaran / Networking	200	300	300	300	300	300	
		Berkembangnya industri kecil dan menengah yang memiliki struktur industri yang kuat dengan kinerja yang efisien dan kompetitif di Kabupaten Kebumen	1	Kegiatan Pembinaan Kemampuan ketrampilan kerja bagi industri kecil menengah di lingkungan IHT dan/atau daerah penghasil bahan baku IHT	Terlaksananya bantuan peralatan untuk IKM di Kabupaten Kebumen	0	215	230	245	260	275	
					Terlaksananya Pelatihan untuk IKM di Kabupaten Kebumen	0	0	0	175	175	175	
			2	Kegiatan pembinaan IKM dalam memperkuat jaringan klaster industri	Terlaksananya bantuan peralatan untuk IKM di Kabupaten Kebumen	250	500	500	600	700	800	
			3	Kegiatan Pemberian Kemudahan izin usaha IKM	Tercapainya pemberian ijin PIRT bagi IKM							

			Program peningkatan kapasitas Iptek sistem produksi	Meningkatnya kesadaran IKM dalam menerapkan merek bagi produknya	142.5	360	250	300	350	350
			1 Kegiatan Pengembangan Kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian, dan kualitas	Fasilitasi pembuatan merek bagi IKM di Kabupaten Kebumen dalam menghadapi persaingan dengan negara lain	21	25	30	35	40	40
			2 Kegiatan Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri	1 Tersusunya database Industri kreatif, inovatif di Kebumen						
				2 Fasilitasi Inovasi Teknologi, dan Industri Kreatif Inovatif	12.6	30	50	70	90	90
		Meningkatnya industri kecil dan menengah yang menghasilkan produk sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI)	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Tersertifikasinya produk IKM yang dihasilkan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku	0	150	100	100	100	100
			Kegiatan pembinaan kemampuan teknologi industri	Jumlah IKM yang layak untuk mendapatkan bantuan perijinan SNI/HAKI/merek barcode melalui sosialisasi	0	200	50	50	50	50
				Jumlah bantuan perizinan/pendaftaran bagi ikm						
		Memberikan informasi kepada masyarakat tentang sentra IKM	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	IKM dapat memberikan informasi sentra-sentra industri potensial kepada masyarakat	-					
			Kegiatan penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	Jumlah sentra industri yang sudah menyediakan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat	-	20	20	20	20	20
		Meningkatnya penerapan inovasi dan teknologi modern pada IKM	Program Pengembangan industri kecil dan menengah	Industri kecil dan menengah yang tangguh dan berdaya saing						
			Kegiatan penerapan IKM secara in-proses	Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan penerapan teknologi	-	30	40	50	50	50
				Jumlah IKM yang mengikuti studi banding	-	50	50	50	50	50

5	Meningkatkan pengendalian perusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh proses produksi di industri	Meningkatnya penerapan teknologi bersih pada proses produksi IKM		Program pengendalian dan perusakan lingkungan hidup	Terwujudnya IKM yang menerapkan teknologi bersih dan berwawasan lingkungan di Kab. Kebumen	-	100	100	100	100	100
			1	Kegiatan penerapan IKM secara IN-Proces	Jumlah IKM yang mendapat pelatihan penerapan teknologi bersih	-					
			2	kegiatan pengendalian dan perusakan lingkungan	Jumlah bantuan investasi peralatan bagi IKM						
					Jumlah IKM yang mendapat pelatihan penerapan teknologi bersih	-	500	550	560	560	560
					Jumlah investasi bantuan peralatan bagi IKM	-					
6	Pengembangan usaha melalui informasi perdagangan dan pengelolaan hasil pertanian	Terciptanya koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi/lembaga terkait dalam memperluas jaringan pemasaran dan pengelolaan gudang dengan sistem resi gudang		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Terlaksananya program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri di Kab. Kebumen	-	50	50	50	50	50
			1	Kegiatan pengembangan pengelolaan gudang dengan sistem resi gudang	Pengembangan pengelolaan gudang dengan sistem resi gudang terlaksana dengan meningkatnya kemanfaatannya gudang bagi usaha pertanian	-					
			2	Kegiatan peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Pengembangan usaha perdagangan melalui kegiatan-kegiatan pameran, promosi dan informasi perdagangan						
			3	Kegiatan Kemudahan perizinan pengembangan usaha	Terwujudnya Fasilitasi perizinan pengembangan usaha bagi UKM	250	175	200	225	250	300
			4	Kegiatan Pengembangan Pasar Lelang Daerah	Terlaksananya pasar Lelang dalam upaya pengembangan peluang pasar produk unggulan dan terlaksananya sekolah Pasar	73.5	200	200	250	300	300
		Terwujudnya efisiensi dan efektivitas sistem distribusi barang dan jasa untuk menjamin pemenuhan kebutuhan	5	Kegiatan pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	Terlaksananya program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	0	60	90	125	175	200

		pokok dan kebutuhan penting masyarakat										
7	Penataan, penertiban dan pemberdayaan PKL dan sejenisnya	Peningkatan penataan, penertiban, dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kab. Kebumen		Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Tertatanya dan tertibnya PKL dan asongan di wilayah Kab. Kebumen	0	0	100	150	200	300	
			1	Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan	Terlaksananya penataan, penertiban, pemberdayaan PKL dan asongan	10	60	75	75	100	100	
			2	Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin PKL dan Asongan	Terlaksananya penyuluhan peningkatan disiplin PKL dan Asongan							
			3	Kegiatan penataan tempat berusaha bagi PKL dan Asongan	Terpenuhinya tempat berusaha bagi PKL dan asonga	45.6	50	100	200	2,500	250	
			4	Kegiatan pengawasan mutu dagangan PKL dan Asongan	Terlaksananya pengawasan mutu dagangan PKL dan asongan	-		260	300	350	350	
			5	Kegiatan fasilitasi modal usaha bagi PKL dan Asongan	Terlaksananya fasilitasi modal usaha bagi PKL dan asongan	-	-	200	300	350	400	
8	Terwujudnya keamanan, keselamatan dan kenyamanan konsumen	Terwujudnya barang dan/atau jasa yang beredar di pasaran yang aman, sehat, dan tidak kadaluwarsa serta terhindar dari barang palsu atau dipalsukan		Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Terwujudnya program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan di Kab. Kebumen	-	-	320	350	400	400	
			1	Kegiatan peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Terlaksananya pengawasan terhadap barang dan jasa beredar di pasaran	-	-	-	50	100	150	
		Terpenuhinya hak-hak konsumen dan penyelesaian sengketa konsumen	2	Kegiatan fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen	Terpenuhinya pelayanan pengaduan dan sengketa konsumen							
		Terwujudnya tertib niaga, tertib ukur, takar, timbng, dan perlengkapannya (UTTP)	3	Kegiatan operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrolgion daerah	Terlaksananya tera ulang alat UTTP	13.3	50	55	55	60	60	

		Peningkatan pengetahuan pelaku usaha dalam memahami praturan di bidang cukai	4	Kegiatan Pengumpulan informasi pita cukai ilegal atau tidak dilekati pita cukai	Terlaksananya pengawasan peredaran pita cukai ilegal	40	0	0	0	0	0
9	Meningkatnya target pendapatan asli daerah	Tercapainya target pendapatan daerah di pasar-pasar daerah		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Tercapainya realisasi PAD yang telah ditargetkan	6	40	1780	1200	4100	4100
			1	kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Tercapainya target pendapatan keuangan daerah	30	40	50	50	50	50
			2	Kegiatan fasilitasi peningkatan PAD	Peningkatan retribusi pelayanan pasar, retribusi kebersihan pasar, retribusi parkir						
10	Tersusunnya Perda tentang pengelolaan pasar daerah	Tersusunnya Perda tentang pengelolaan pasar-pasar daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat		Program penataan peraturan perundang-undangan	Tersusunnya Perda tentang pengelolaan pasar di Kab. Kebumen	105	300	400	500	600	
				Kegiatan legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	Terusunya Perda tentang (6 perda) :	0	50	100	150	200	250
					Pengelolaan pasar	200			200	200	
		Tersosialisasinya perda tentang pengelolaan pasar-pasar daerah		Program penataan peraturan perundang-undangan	Tersosialisasinya perda tentang pasar kepada masyarakat						
				Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Tersosialisasinya 6 Perda tentang pasar dan PKL						
11	Mendukung peningkatan pelayanan pada masyarakat di bidang penyediaan dan pengaturan fasilitasi perdagangan	Meningkatnya kualitas pelayanan kebersihan pasar daerah melalui pengelolaan persampahan		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana kantor dan pasar dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat						
				Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kebersihan pasar	Tersedianya sarana dan prasarana peralatan kebersihan pasar tradisional		150		150	200	
				Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Tersedianya sarana prasarana pengolah persampahan yang modern						

				Kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Terpenuhinya prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	60	70	80	90	100	
	Pengembangan usaha melalui informasi perdagangan dan pengelolaan hasil pertanian	Terlaksanannya pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri		program peningkatan dan pengembangan ekspor	terlaksanannya pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri						
			1	Kegiatan pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri	Tepenuhinya informasi peluang pasar luar negeri	200	300	300	360	400	400
			2	Membangun jejaring dengan ekportir	Adanya eksportir di kabupaten kebumen						
		Tersedianya petugas untuk kebersihan dan keamanan pasar		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Terlaksananya program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri di Kab. Kebumen	0	60	100	150	150	150
				Kegiatan pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan	Terpenuhinya kebersihan dan keamanan pasar	0	80	150	150	180	200
		Terwujudnya efisiensi dan efektivitas sistem distribusi barang dan jasa untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pokok dan kebutuhan penting masyarakat		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Terlaksananya program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri di Kab. Kebumen						
				Pemeliharaan/rehabilitasi pasar-pasar daerah	- Jumlah pasar daerah baru yang dibangun	682	1843.2	2592.72	3594.24	3594.24	3594.24
					- Renovasi/rehabilitasi pasar-pasar daerah	9,200	7,000	1,880	2,400	6,700	7,500
					- Revitalisasi/pembangunan pasar daerah yang sudah ada					25,000	20,000
					- Terpeliharanya pasar-pasar daerah,	9,200	7,000	1,880	2,400	6,700	7,500
					- DED Pembangunan Pasar Jogosimo	12,000	6,000	17,000	50,000	23,000	40,000
					- Review DED Pasar Puring	150	200	250	300	350	400
					- DED Pembangunan Pasar Jogosimo		27				
					- Review DED Pasar Puring		20				
					- Asuransi Pasar		170	200	250	300	350

BAB VI.
INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN
RPJMD

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen dalam menjalankan program dan kegiatan untuk pelayanan kepada masyarakat berdasar tugas dan fungsinya adalah dalam rangka pencapaian Visi Misi yang tertuang dalam RPJMD kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021. Indikator Program yang tertuang dalam renstra ini disamping untuk mendukung pencapaian visi misi tersebut juga untuk pemenuhan kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintah daerah.

Beberapa indikator kinerja program yang terkait dengan pencapaian visi misi Bupati dan wakil Bupati tersebut secara lengkap dituangkan dalam Tabel 6.1

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Program yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Daerah Dalam RPJMD
Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021

No.	Indikator kinerja sasaran		Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp. 000.000,-)						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD
	Indikator kinerja utama Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
				Target	Target	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Pelayanan kantor dan tertib administrasi								
		Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	72 bulan
		Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	72 bulan
		Tercapainya pemeliharaan dan BBM kendaraan dinas		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	72 bulan
		Tercapainya penatausahaan keuangan		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	72 bulan
		Tercapainya kebersihan kantor		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	72 Bulan
		Terpenuhinya perbaikan peralatan kantor		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	72 Bulan
		Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	72 Bulan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan		12 bulan	72 Bulan					
		Terpenuhinya penerangan kantor		12 bulan	72 Bulan					
		Terpenuhinya bahan bacaan		12 bulan	72 Bulan					
		Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minumam untuk rapat tamu		12 bulan	72 Bulan					
		Terselenggaranya perjalanan luar daerah ke pusat dan provinsi		12 bulan	72 Bulan					
		Tercapainya pemenuhan honor PTT		12 bulan	72 Bulan					
		Terselenggaranya perjalanan dinas dalam daerah		12 bulan	72 Bulan					
		Tersedianya sarana dan prasarana kantor dan pasar dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat								
		Terbangunnya gedung Gudang Kantor		-	2 Unit	-	2 Unit	-	-	4 unit

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Terpenuhinya kendaraan dinas operasional		4 unit(1 Amrol, 3 Sepeda motor)	7 Unit (4 Sepeda Motor, 1 Avanza, 1 Pick up,1 Amrol)	5 Unit (1 Amrol Kontainer dan 4 Kendaraan Roda 3)	2 Unit(1Amrol container, 1 Kendaraan Metrologi)	1 Unit Avanza	0	19 Unit
		Terpenuhinya lokasi tanah untuk pembangunan pasar		1 lokasi	0	1 Lokasi	0	-		2 Lokasi
		Terpeliharanya gedung kantor		1 unit	1 gedung dan 1 tempat parkir	3 Kantor, Dekranasda, SRG	3 Kantor, Dekranasda, SRG	3 Kantor, Dekranasda, SRG	3 Kantor, Dekranasda, SRG	15 Unit
		Terpenuhinya perlengkapan kantor		2 unit AC dan 1 unit sound system	1 generator, 1 Stabiliser, 1 Tempat Baleho, 1 papan pengumuman ,8 vas Bunga,3 White board, 6 AC.		1 Generator, 7 unit Amplifier, 21 unit Horn	7 unit Amplifier, 21 Unit Horn	7 unit Amplifier, 21 Unit Horn	81 Unit
		Terpenuhinya peralatan gedung kantor		mesin ketik (2 unit), lcd proyektor (1 unit), PC komputer (1 unit), laptop (1 unit), printer (1 unit)	4 PC, 4 Leptop, Printer A3, 2 Hardis External, Printer Laser Jet, 1 Handycam, 1 Camera.	2 leptop	-	1 Komputer	-	22 Unit

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Terpenuhinya meubel kantor		Almari kaca (2 unit), filling kabinet (2 unit), meja kerja (10 unit), kursi kerja staf (10 unit), kursi eselon (13 unit), sekat ukir (2 unit), lemari arsip mobil (5 unit)	48 unit kursi tamu 2 lemari kaca etalase, 12 meja rapat 8 kursi kerja 18 meja kerja 5 kursi eslon	4 Sofa UPTD dan mebulair di pasar-pasar daerah	-	-	-	131
2		Dokumen perencanaan, pelaporan, dan evaluasi								
		Tersusunnya dokumen renja, renstra, LAKIP, LKPJ, LPPD, dan laporan progres target dan realisasi bulanan	6	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	30 dokumen
		Data base yang mutakhir dan berkualitas								
		Tersusunnya data base industri, perdagangan dan pengelolaan pasar	0	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	15 dokumen
		Tersusunnya Sistem Informasi Industri Daerah, dan Penyiapan Pembangunan Kawasan Industri	Belum ada	-	Tersusunnya Naskah Akademik, Raperda RPIK, dan Sistem Informasi Industri Daerah	Sistem Informasi Industri Daerah (Update data) dan pembahasan Raperda RPIK	Sistem Informasi Industri Daerah (Update data)	Sistem Informasi Industri Daerah (Update data)	Sistem Informasi Industri Daerah (Update data)	Tersusunnya Data-data Industri yang valid dan terupdate
					Penyusunan DED Kawasan Industri					
4		Industri kecil dan menengah yang tangguh dan berdaya saing								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Terlaksananya bantuan peralatan dan pelatihan untuk pengembangan SDM bagi industri kecil gula semut supaya produk yang dihasilkan sesuai dengan standar ekspor dan bisa menjadi ikon Kab Kebumen	Industri kecil gula semut yang ada di Kabupaten Kebumen saat ini baru sekitar 200 unit usaha yang memproduksi gula semut secara berkelanjutan	4 kelompok	4 kelompok	4 kelompok	4 kelompok	4 kelompok	4 kelompok	Industri gula semut sudah mapan dengan produk diterima ekspor dan juga pasaran di dalam negeri
		Terlaksananya fasilitasi / Pelatihan kegiatan industri kreatif berbasis sumber daya lokal	Belum ada	-	30 peserta / 1 Pelatihan 4 hari	30 peserta / 1 Pelatihan 4 hari	30 peserta / 1 Pelatihan 4 hari	30 peserta / 1 Pelatihan 4 hari	30 peserta / 1 Pelatihan 4 hari	6 kali pelatihan
		Terjalinya kerjasama / kemitraan antara IKM dengan swasta dalam peningkatan jaringan pemasaran / Networking	Belum optimalnya kemitraan IKM dengan Swasta	-	-	-	10 IKM	10 IKM	10 IKM	30 IKM terfasilitasi kemitraan dengan pihak swasta
		Terlaksananya bantuan peralatan untuk IKM di Kabupaten Kebumen	IKM yang ada sebagian besar masih menggunakan peralatan yang tradisional, hanya sedikit yang sudah modern dan kemampuan SDM perlu ditingkatkan	5 Pelatihan	9 Pelatihan / Magang	7 Pelatihan, 1 Bantuan Alat	9 Pelatihan / Magang dan 2 Bantuan Alat	9 Pelatihan / Magang dan 2 Bantuan Alat	9 Pelatihan / Magang dan 2 Bantuan Alat	IKM yang ada di Kab. Kebumen sudah menggunakan peralatan yang modern
		Terlaksananya Pelatihan untuk IKM di Kabupaten Kebumen								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Terlaksananya bantuan peralatan untuk IKM di Kabupaten Kebumen	IKM yang ada sebagian besar masih menggunakan peralatan yang tradisional, hanya sedikit yang sudah modern dan kemampuan SDM perlu ditingkatkan	6 paket	6 Pelatihan /Magang	5 pelatihan / Magang	6 paket	7 paket	7 paket	Pola pikir industriawan IKM tersebut sudah maju dan mampu bersaing dengan IKM negara lain
		Tercapainya pemberian ijin PIRT bagi IKM	Masih banyaknya IKM yang belum memiliki ijin PIRT	200 KUB	250 KUB	300 KUB	350	400 KUB	400 KUB	
		Meningkatnya kesadaran IKM dalam menerapkan merek bagi produknya								
		Fasilitasi pembuatan merek bagi IKM di Kabupaten Kebumen dalam menghadapi persaingan dengan negara lain	Pola pikir sebagian besar masih sederhana, belum siap menghadapi pesaing global	15 IKM	20 IKM	25 IKM	30 IKM	35 IKM	35 IKM	Produk IKM yang sudah memiliki brand dan merek sendiri
		Tersusunnya database Industri kreatif, inovatif di Kebumen	Belum adanya database industri kreatif dan inovatif	-	160 IKM Industri Kreatif Inovatif	Bertambahnya 40 IKM Industri Kreatif Inovatif	Bertambahnya 50 IKM Industri Kreatif Inovatif	Bertambahnya 50 IKM Industri Kreatif Inovatif	Bertambahnya 50 IKM Industri Kreatif Inovatif	350 IKM Industri Kreatif Inovatif
		Fasilitasi Inovasi Teknologi, dan Industri Kreatif Inovatif	Belum terfasilitasinya industri-industri kreatif inovatif di Kebumen	-	16 Industri Kreatif Inovatif (Video, Kriya, Kuliner, Fashion dan Desain Produk)	bertambahnya 4 Industri Kreatif Inovatif (Video, Kriya, Kuliner, Fashion dan Desain Produk)	bertambahnya 4 Industri Kreatif Inovatif (Video, Kriya, Kuliner, Fashion dan Desain Produk)	bertambahnya 4 Industri Kreatif Inovatif (Video, Kriya, Kuliner, Fashion dan Desain Produk)	bertambahnya 4 Industri Kreatif Inovatif (Video, Kriya, Kuliner, Fashion dan Desain Produk)	bertambahnya 4 Industri Kreatif Inovatif (Video, Kriya, Kuliner, Fashion dan Desain Produk)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Tersertifikasinya produk IKM yang dihasilkan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku								
		Jumlah IKM yang layak untuk mendapatkan bantuan perijinan SNI/HAKI/merek barcode melalui sosialisasi	Sertifikasi produk IKM sebagian besar masih terabaikan	-	40 IKM	50 IKM	60 IKM	70 IKM	70 IKM	Produknya sudah tersertifikasi dan sesuai standar yang berlaku, sehingga sudah dapat diekspor ke luar negeri
		Jumlah bantuan perizinan/pendaftaran bagi ikm	Perizinan/pendaftaran SNI 5 IKM	-	5 IKM					
			Perizinan/pendaftaran HKI/merek 10 IKM	-	10 IKM					
			Perizinan/pendaftaran barcode 100 IKM	-	100 IKM	150 IKM	200 IKM	250 IKM	250 IKM	
		IKM dapat memberikan informasi sentra-sentra industri potensial kepada masyarakat								
		Jumlah sentra industri yang sudah menyediakan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat	Belum adanya informasi petunjuk sentra industri	-	6 IKM	8 IKM	10 IKM	10 IKM	10 IKM	
		Industri kecil dan menengah yang tangguh dan berdaya saing								

		Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan penerapan teknologi	Pelatihan proses produksi emban cincin 30 IKM	-	30 IKM					
		Jumlah IKM yang mengikuti studi banding	Studi banding proses produksi emban cincin 30 IKM	-	30 IKM					
			Bantuan peralatan untuk 10 IKM	-	3 IKM					
5		Terwujudnya IKM yang menerapkan teknologi bersih dan berwawasan lingkungan di Kab. Kebumen								
		Jumlah IKM yang mendapat pelatihan penerapan teknologi bersih		-	50 IKM	60 IKM	60 IKM	60 IKM	60 IKM	Pelatihan proses produksi yang telah diikuti oleh 300 IKM
		Jumlah bantuan investasi peralatan bagi IKM		-	2 IKM	3 IKM	3 IKM	4 IKM	4 IKM	Bantuan peralatan untuk 20 IKM
		Jumlah IKM yang mendapat pelatihan penerapan teknologi bersih		-	20 IKM	Pelatihan proses produksi bersih pupuk kompos bagi 20 IKM				
		Jumlah investasi bantuan peralatan bagi IKM		-	3 IKM	4 IKM	5 IKM	6 IKM	6 IKM	Bantuan alat dan pengujian laborat bagi 20 IKM
6		Terlaksananya program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri di Kab. Kebumen								

		Pengembangan pengelolaan gudang dengan sistem resi gudang terlaksana dengan meningkatnya kemanfaatan gudang bagi usaha pertanian	Penyimpanan hasil usaha perdagangan sektor pertanian meningkat lebih dari 2 ton	terlaksananya pengelolaan gudang sistem resi gudang (SRG)	3 ton	4 ton	5 ton	6 ton	7 ton	Gudang dengan SRG sudah bisa beroperasi tanpa subsidi pemerintah
		Pengembangan usaha perdagangan melalui kegiatan-kegiatan pameran, promosi dan informasi perdagangan	Pelaksanaan pameran lebih dari 5 kali dalam setahun	7 kali	6 kali	6 kali	7 kali	8 kali	8 kali	Pelaksanaan pameran, promosi dan informasi perdagangan lebih dari 8 kali
		Terwujudnya Fasilitasi perizinan pengembangan usaha bagi UKM	Pendampingan dalam pengembangan usaha UKM yang difasilitasi izin usaha barkot, halal, PIRT dan BPPOM 5	5 UKM	10 UKM	12 UKM	15 UKM	20 UKM	25 UKM	77 UKM
		Terterselenggaranya pasar Lelang dalam upaya pengembangan peluang pasar produk unggulan dan terselenggaranya sekolah Pasar	Pelaksanaan pasar lelang 4 Kali setahun dan terselenggaranya Sekolah Pasar bagi pedagang pasar rakyat	0	0	40 Orang	60 Orang	80 Orang	100 Orang	280 Orang
		Terselenggaranya program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Tercapainya peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri untuk kesejahteraan rakyat	Pantauan/monitoring harga, ketersediaan dan distribusi Kepokmas di 5 (lima) pasar rakyat	Pantauan/monitoring harga, ketersediaan dan distribusi Kepokmas di 5 (lima) pasar rakyat	Pantauan/monitoring harga, ketersediaan dan distribusi Kepokmas di 8 (delapan) pasar rakyat	Pantauan/monitoring harga, ketersediaan dan distribusi Kepokmas di 8 (delapan) pasar rakyat	Pantauan/monitoring harga, ketersediaan dan distribusi Kepokmas di 10 (sepuluh) pasar rakyat	Pantauan/monitoring harga, ketersediaan dan distribusi Kepokmas di 10 (sepuluh) pasar rakyat	Terpenuhinya data Kepokmas dan barang penting

7		Tertatanya dan tertibnya PKL dan asongan di wilayah Kab. Kebumen								
		Tertindakannya penataan, penertiban, pemberdayaan PKL dan asongan	Banyaknya PKL dan asongan yang belum tertata dan tertib	1 Pembinaan PKL	1 Pembinaan PKL	4 Pembinaan PKL (Karang anyar, Prembun, Sruweng dan Petanahan)	1 Pembinaan PKL	1 Pembinaan PKL	1 Pembinaan PKL	Pedagang kaki lima yang tertib
		Tertindakannya penyuluhan peningkatan disiplin PKL dan Asongan	Banyaknya PKL dan asongan yang tidak disiplin	-		2 Kec	3 Kec	3 Kec	3 Kec	Pedagang kaki lima dan Asongan Disiplin
		Terpenuhinya tempat berusaha bagi PKL dan asongan	Banyaknya PKL yang menempati usaha di area terlarang	-	0	2 Kec	2 Kec	2 Kec	2 Kec	8 Kec
		Tertindakannya pengawasan mutu dagangan PKL dan asongan	Banyaknya PKL yang belum paham perlunya mutu dagangan	-	-	3 Kec	3 Kec	3 Kec	3 Kec	12 Kec
		Tertindakannya fasilitasi modal usaha bagi PKL dan asongan	Banyaknya PKL dan asongan yang membutuhkan tambahan modal	-	-	-	50 PKL	100 PKL	150 PKL	300 PKL
8		Terwujudnya program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan di Kab. Kebumen								
		Tertindakannya pengawasan terhadap barang dan jasa beredar di pasaran	Tercapainya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Pengawasan barang dan jasa beredar di 26 kecamatan	Pengawasan barang dan jasa beredar di 26 kecamatan	Pengawasan barang dan jasa beredar di 26 kecamatan	Pengawasan barang dan jasa beredar di 26 kecamatan	Pengawasan barang dan jasa beredar di 26 kecamatan	Pengawasan barang dan jasa beredar di 26 kecamatan	Barang dan jasa beredar di pasar memenuhi syarat / standard

		Terpenuhinya pelayanan pengaduan dan sengketa konsumen	Tercapainya hak-hak konsumen	120 pengaduan	0	0	0	0	0	Pelaku usaha bersikap jujur dan bertanggung jawab
		Terlaksananya tera ulang alat UTTP	Terpenuhinya alat UTTP yang legal	Pengawasan tera ulang di 26 kecamatan	Tertib uur, takar, timbang, dan perlengkapannya					
		Terlaksananya pengawasan peredaran pita cukai ilegal	Terpenuhinya produk rokok dengan pita cukai ilegal	Terpenuhinya produk rokok dengan pita cukai ilegal di 26 kecamatan	Terpenuhinya produk rokok dengan pita cukai ilegal di 26 kecamatan	Terpenuhinya produk rokok dengan pita cukai ilegal di 26 kecamatan	Terpenuhinya produk rokok dengan pita cukai ilegal di 26 kecamatan	Terpenuhinya produk rokok dengan pita cukai ilegal di 26 kecamatan	Terpenuhinya produk rokok dengan pita cukai ilegal di 26 kecamatan	Produk rokok dengan pita cukai legal
9		Tercapainya realisasi PAD yang telah ditargetkan								
		Tercapainya target pendapatan keuangan daerah		4 UPTD Pasar	4 UPTD Pasar					
		Peningkatan retribusi pelayanan pasar, retribusi kebersihan pasar, retribusi parkir		-	4 UPTD Pasar	4 UPTD Pasar				
10		Tersusunnya Perda tentang pengelolaan pasar di Kab. Kebumen								
		Terusunnya Perda tentang (6 perda) :		6 Perda			5 perda	5 perda		15 perda
		Tersosialisasinya perda tentang pasar kepada masyarakat								
		Tersosialisasinya 6 Perda tentang pasar dan PKL			6 Perda		5 Perda	5 perda		15 perda

11		Tersedianya sarana dan prasarana kantor dan pasar dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat								
		Tersedianya sarana dan prasarana peralatan kebersihan pasar tradisional		4 UPTD Pasar	4 UPTD Pasar	4 UPTD Pasar	4 UPTD Pasar	4 UPTD Pasar		
		Tersedianya sarana prasarana pengolahan persampahan yang modern								
		Terpenuhinya prasarana dan sarana pengelolaan persampahan		4 UPTD Pasar	4 UPTD Pasar	4 UPTD Pasar	4 UPTD Pasar	4 UPTD Pasar	4 UPTD Pasar	4 UPTD Pasar
		terlaksanannya pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri								
		Terpenuhinya informasi peluang pasar luar negeri	1 IKM	0	1 Kali Pameran	1 Kali pameran	3 Kali pameran	3 Kali pameran	3 Kali pameran	Terpenuhinya informasi peluang pasar perdagangan luar negeri
		Adanya eksportir di kabupaten kebumen	1 Ekportir	0	1 Ekportir	1 Ekportir	2 eksportir	3 Eksportir	3 Eksportir	Adanya ekportir di kabupaten kebumen
		Terlaksananya program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri di Kab. Kebumen								
		Terpenuhinya kebersihan dan keamanan pasar		64 orang	166 orang	208 orang				

		Terlaksananya program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri di Kab. Kebumen								
		Jumlah pasar daerah baru yang dibangun	Lahan tersedia untuk pasar Pon Padureso dan pasr burung dan Klitikan					1 Pasar Padureso	1 Pasar Burung dan Klitikan	2 Pasar Daerah
		Renovasi/rehabilitasi pasar-pasar daerah	Dinding pasar cat yang pudar, pagar pasar belum ada, penambahan kios, drainase kurang lancar, hidrant belum ada, cctv belum ada, informasi harga belum ada, penambahan los, talang pasar		5 pasar (Ambal, Indarakila, Ayah, Tumenggungan dan pasar Hewan Karanganyar)	360 Unit Blower untuk 9 Pasar Daerah dan Rehab Rehab pasar Daerah untuk 4 UPTD Pasar	4 UPTD Pasar	4 UPTD Pasar	4 UPTD Pasar	4 UPTD Pasar
		Revitalisasi/pembangunan pasar daerah yang sudah ada	Pasar kondisi rusak	1 pasar	2 pasar (Ungaran, Caruban)	4 pasar (jogosimo, Hewan Argopeni, Puring dan Kritig.)	5 pasar (Jogosimo,	3 pasar	3 pasar	18 Pasar
		Terpeliharanya pasar-pasar daerah,	Sarana prasarana pasar kondisinya memerlukan pemeliharaan,	4 UPTD Pasar	4 UPTD Pasar	4 UPTD Pasar	4 UPTD Pasar	4 UPTD Pasar	4 UPTD Pasar	4 UPTD Pasar
		DED Pembangunan Pasar Jogosimo			1 Pasar Jogosimo					
		Review DED Pasar Puring			1 Pasar Puring					
		Asuransi Pasar			17 Pasar	20 Pasar	25 Pasar	30 Pasar	35 pasar	35 Pasar

BAB VII. PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 merupakan panduan kerja bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen, selama 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan kepala daerah terpilih yang direncanakan dalam rangka mendukung pencapaian visi misi Kepala Daerah.

A. Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan kerja tahun 2021 dimana periode rencana strategis ini berakhir sampai dengan tahun 2020, maka dokumen ini tetap menjadi acuan penyusunan rencana kerja tahun 2021. Program yang akan dilaksanakan tahun 2021 adalah program transisi karena program tersebut adalah program sementara sebelum ditetapkannya rencana strategis yang baru yang merupakan penjabaran dari visi misi dan program Kepala Daerah Periode Tahun 2021-2025. Program transisi ini tetap mengacu pada prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 dan RPJP Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 tahun ke empat.

B. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen selama kurun waktu Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021. Oleh karena itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen berkewajiban melaksanakan program-program dalam rencana strategis dan RPJMD Tahun 2016-2021 dengan sebaik-baiknya;
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen berkewajiban menyusun rencana kerja sesuai tugas dan fungsi berpedoman pada rencana strategis dan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan rencana strategis, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen diwajibkan menjabarkan rencana strategis ini ke dalam rencana kerja tahunan;
4. Rencana strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2016-2021 sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen

Lampiran-lampiran

a. Format Rancangan Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD

BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN FORUM SKPD/KONSULTASI PUBLIK
PENYUSUNAN RENSTRA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN
PENGELOLAAN PASAR KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2016-2021

Pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Dua bulan September tahun Dua Ribu Enam Belas sampai dengan hari tanggal dua puluh dua bulan September tahun Dua Ribu Enam Belas telah diselenggarakan forum SKPD Penyusunan Renstra SKPD Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRANI berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan:

- a. Pemaparan materi..... (disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan)
- b. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum SKPD terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi, maka pada:

Hari dan Tanggal : Kamis, 22 September 2016

J a m :

Tempat : Ruang Rapat Jatijajar Komplek Rumah Dinas Bupati
Kebumen

forum SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota*)..... :

MENYEPAKATI

- KESATU : Isu strategis (pelayanan) SKPD, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan pelayanan rancangan Renstra SKPD..... provinsi/kabupaten/kota*)... ..Tahun - sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini (sebagaimana tabel 4.3)
- KEDUA : Rencana program dan kegiatan prioritas SKPD..... provinsi/kabupaten/kota*) ... Tahun - yang disertai dengan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini (SEBAGAIMANA Tabel 5)
- KETIGA : Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN IV berita acara ini (sebagaimana Tabel 6)
- KEEMPAT : Berita acara ini beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renstra SKPD..... Provinsi/Kabupaten/Kota*) Tahun-.....